



TARIAN KHAS DAYAK BELUSU MASUK REKOR MURI KEDUA KALINYA

BACA HALAMAN 2-3



8 PERSONEL POLDA
KALTARA, DIBERHENTIKAN
TIDAK HORMAT

BACA HALAMAN 12



Ribuan penari adat Dayak Belusu ikut meriahkan hari kesenian saat perayaan HUT Kabupaten Malinau.

Tarian Khas Dayak Belusu Masuk Rekor Muri Kedua Kalinya

TANA TIDUNG - Setiap daerah di Kaltara, memiliki ciri khas dan keunikan budaya masing-masing. Hal itu, merupakan peluang yang dimiliki dan jika dibudidayakan dengan baik, maka outputnya akan memperoleh nilai ekonomi, dari aspek wisata.

Karena seyogianya, setiap pelestarian budaya mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain karena budaya sebagai sumber nilai dan identitas bangsa, juga dapat berperan penting dalam peningkatan ekonomi.

Kepada media ini, wakil Bupati KTT, Hendrik mengungkapkan di Bumi Untaka kata lain dari KTT, memiliki potensi dan keunggulan budaya yang masih perlu di promosikan hingga ke kanca Nasional bahkan Internasional. Hal itu, diungkapkan Hendrik, usai mengikuti gelaran tarian seni dan budaya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Malinau.

Dimana, tarian adat Dayak Belusu meraih rekor muri yang kedua kalinya. "Kami berharap, gelaran budaya ini, semakin ditingkatkan ke depan-

nya. Sehingga, lebih dikenal secara luas baik di kanca Nasional maupun Internasional," tuturnya.

Tarian adat Belusu, telah mendapatkan Muri Dunia yang kedua kalinya, hal ini wajib diapresiasi. Karena, prestasi yang diraih setelah melalui tahapan kerja keras, kekompakan dan keuletan bersama. "Saya bangga dengan perolehan muri ini, yang kedua kalinya. Semoga, melalui rekor ini budaya adat Belusu makin di kenal secara luas oleh masyarakat untuk mengait para wisatawan," tuturnya.



Wabup menambahkan, tarian adat Dayak Bulusu yang ditampilkan merupakan jenis tarian seribu riti. Saat penampilan, peserta nampak kompak dengan kombinasi yang serasi nan unik. Diterangkan wabup, di pergelangan kaki terdapat asesoris gelang kaki yang memiliki suara yang khas.

Dikatakan, wabup kata riti merupakan aksesoris khas masyarakat adat Dayak Bulusu. Bentuknya, berupa gelang kaki yang terbuat dari tembaga yang diwariskan oleh nenek moyang tiap keluarga.

Biasanya, digunakan oleh penari perempuan sebagai pengiring atau

bagian yang tak terpisahkan dari prosesi pada aacara kebesaran adat Dayak Bulusu. Sehingga kemudian, disebut sebagai tarian riti. (tin/and)

Editor: Andhika





Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

Kegiatan Peningkatan Drainase, Harap Kawasan Kerap Banjir Teratasi

TANJUNG REDEB – Pembangunan dan peningkatan drainase di beberapa titik perkotaan diharapkan dapat mengatasi genangan air yang masih terjadi di wilayah perkotaan Tanjung Redeb.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman menyarankan, selain fungsi drainase untuk irigasi tentunya keindahan kota pun harus dijaga. Sakirman juga mendorong pembangunan drainase dapat dituntaskan pun tidak ada yang mangkrak.

“Jaringan drainase yang masih diproses ada dua, ada yang langsung pada badan jalan dan langsung pada trotoar, semoga segera dituntas-

kan,” ucapnya.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik banjir yang ada di daerah perkotaan. Diakuinya, pemasangan drainase pada jalur irigasi yang rawan banjir sebagian telah terpasang. “Semoga beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Berau dapat teratasi,” harapnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya sebatas pemasangan U-gutter saja tapi tidak dituntaskan secara menyeluruh di bagian atasnya. “Jangan hanya sebagian saja yang dikeramik dan sebagiannya tidak, jika seperti itu maka keindahan kotanya tidak didapat,” tuturnya.

Terkait pemasangan drainase yang berada di sekitar GOR Pemuda yang terlihat merusak jalan. Dirinya menjelaskan pengerjaannya masih berjalan dan belum selesai. Semoga ketika telah selesai bisa diperbaiki jalan yang telah rusak akibat pemasangan drainase tersebut.

“Jangan hanya irigasinya yang ditingkatkan, pemasangan keramik, penanaman pohon, dan lampu penerangan bisa dipasang. Mengingat jalan tersebut termasuk pintu masuk dan wajah bagi Kabupaten Berau,” tandasnya. (adv/and)

Dorong Pemerintah Beri Dukungan Masif Terhadap Dunia Literasi



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ihsan Rapi

TANJUNG REDEB – Dunia literasi sangat berpengaruh terhadap ilmu yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ihsan Rapi mendorong eksekutif untuk memberi dukungan yang masif.

Dia menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus fokus kepada perkembangan literasi di Bumi Batiwakkal. Pasalnya dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). “Literasi itu penting, apalagi kebodohan telah banyak memakan korban. Kita harus rajin baca buku, baik itu bentuk fisik maupun digital,” katanya.

Dirinya mengaku merasa prihatin. Sebab masih minimnya tenaga perpustakaan yang mengantongi akreditasi. Termasuk perpustakaan yang sudah berjenjang nasional. “Hal itu saya ketahui setelah mendengar pemaparan Ketua Atpusi Berau, Mariani saat festival literasi beberapa waktu lalu,”

ungkap pria yang juga Ketua Gerakan Masyarakat Minat Baca (GPMB) Berau ini.

Ihsan menilai, pustakawan harus orang-orang yang profesional di bidangnya. Maka dari itu, kata dia, tenaga perpustakaan yang terakreditasi perlu ditingkatkan. “Termasuk perpustakaan sekolah yang belum bertaraf nasional ini yang harus juga kita perhatikan, bagaimana langkahnya, paling tidak dengan menambah koleksi buku-buku baru dan terpopuler,” ungkapnya.

Agar keinginan tersebut tercapai, terangnya, diperlukan minat yang tinggi oleh anak didik. Untuk menariknya, perpustakaan harus modern. “Jadi kita pancing dulu minatnya dengan edukasi yang bagus, ditambah fasilitas pendukung. Makanya perpustakaan juga harus bisa bertransformasi dengan lebih baik dan modern,” tutupnya. (adv/and)



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris saat menyerahkan bantuan 23 ekor sapi di Kampung Dumaring lewat dana pokir.

Serahkan Bantuan 23 Ekor Sapi, Waris Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris menyerahkan bantuan hewan ternak 23 ekor sapi secara langsung kepada kelompok ternak sapi di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan.

Dia mengatakan, kelompok ternak sapi yang menerima bantuan harus memanfaatkan bantuan tersebut dengan maksimal, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. “Saya harap hewan ternak yang diberikan bisa dipelihara dengan baik, agar kedepannya bisa terus dikembangkan,” katanya.

Dirinya mengaku sangat menging-

inkan dalam budidaya ternak, penerima bantuan dapat memperhatikan kawasan lingkungan untuk dapat tetapi bersih dan sehat.

Abdul Waris juga bertekad akan melanjutkan bantuan serupa demi kembali menggeliatkan ekosistem peternakan maupun ekosistem perekonomian masyarakat.

“Karena program-program seperti ini dapat menjadi upaya menggeliatkan ekosistem peternakan yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini menyebut, program-program seperti pembe-

rian bantuan hewan ternak dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat pesisir selatan Bumi Batiwakkal.

Lebih lanjut, Ketua Kelompok Ternak Sapi Kampung Dumaring, Bruno mengucapkan terimakasih kepada Abdul Waris. Disampaikannya, bantuan tersebut diusulkan pada reses tahun lalu. “Saya sangat bersyukur karena usulan kami terealisasi. Kami juga sangat mengapresiasi. Kami ingin anggota dewan seperti beliau, tidak hanya janji-janji saja waktu reses, tetapi tidak ada realisasinya,” tandasnya. (adv/and)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi untuk Ketahui Permasalahan BBM

TANJUNG REDEB – Adanya Surat Edaran (SE) Bupati mengenai larangan pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggapi Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dia menilai, dengan keluarnya SE Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengevaluasi hal itu bersama dengan pihak terkait.

Dijelaskan Madri, evaluasi penting dilakukan agar mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai BBM di Bumi Batiwakkal.

“Seharusnya Kabag Ekonomi turun ke lapangan untuk mengecek BBM langsung ke Jobber yang ada di Samburakat. Bahkan saya pernah melakukan sidak, namun dianggap sepele, padahal sangat berdampak

sekarang,” ujarnya.

Dirinya menerangkan, untuk mengetahui kebutuhan BBM masyarakat umum hingga sektor pertanian dan perikanan, seharusnya ada kajian mengenai jumlah penduduk dan kendaraan.

Dibeberkannya, SPBU yang ada di Berau sejumlah 14 SPBU. Namun kuota yang didapatkan Berau jauh lebih sedikit daripada Bulungan yang hanya 4 SPBU.

“Hal Itu yang harus diwaspadai dan dipertanyakan. Pemkab juga harusnya mengkaji berapa jumlah penambahan kendaraan roda dua maupun roda empat setiap tahunnya,” tegasnya.

Madri juga menyinggung soal larangan penjualan BBM eceran. Pada-

hal, kata dia, hal tersebut membantu masyarakat memperoleh BBM dalam 24 jam. Terlebih saat ini, di Berau belum ada SPBU yang buka 24 jam.

“Tetapi pihak SPBU tidak bisa disalahkan sepenuhnya, kenapa tidak beroperasi 24 jam, sedangkan jatah BBM saja masih kurang. Dengan adanya pengetab ini saya rasa membantu masyarakat yang membutuhkan BBM pada malam hari,” tuturnya.

Dirinya berharap, pemerintah segera memberi solusi dan mengevaluasi persoalan yang terjadi saat ini. “Terutama soal BBM. Ajak seluruh pihak dan instansi terkait untuk diskusi agar persoalan ini ada jalan keluarnya,” tandasnya. (adv/and)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadhah saat reses di Kelurahan Karang Ambon.

Reses Syarifatul, Terima Beragam Aspirasi Masyarakat

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadhah melaksanakan reses masa sidang III di Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb pada Minggu (22/10/2023) malam.

Syarifatul memaparkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan yakni penutupan parit di Jalan Kemakmuran agar dapat dilalui pejalan kaki dan perluasan badan jalan. "Kendaraan yang melintas semakin banyak dan padat, sehingga usulan ini yang diminta warga untuk bisa saya penuhi," ungkapnya.

Lanjutnya, Penerangan Jalan Umum juga diusulkan oleh ketua RT 08, mengingat hal tersebut untuk menghindari adanya kriminalitas yang tidak diinginkan. "Jalan yang

gelap menyulitkan pihak RT untuk melakukan pengawasan, dengan adanya PJU tentunya bisa membantu sekali," tuturnya.

Syarifatul menyebut, permintaan warga RT 08 yang terakhir adalah pemenuhan kelengkapan penunjang di Posyandu Pelangi. Pasalnya, posyandu tersebut masih banyak kekurangan untuk bisa memaksimalkan pelayanannya. "Termasuk kondisi bangunan yang perlu dilakukan pengecatan ulang, kursi yang kurang hingga seragam bagi para kader posyandu tersebut," bebernya.

"Ini tidak bisa dicover dengan Dana RT, juga menurut saya tidak terlalu besar nominalnya, jadi secara pribadi saya akan membantu," sambungnya.

Sedangkan, untuk usulan penut-

upan parit, diakui Politisi Partai Golkar ini akan menunggu di APBD Berau di Tahun 2024 mendatang.

"Kalau tidak APBD murni kita ushakan di perubahan tahun depan, mengingat banyak sekali usulan yang ia terima dari kegiatan reses masa sidang III tahun ini. Pasti akan terpenuhi, tapi bertahap dan bergantian," terangnya.

Begitu juga dengan usulan tentang PJU, Syarifatul mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Instansi terkait dimana saja titik-titik reses yang ia laksanakan untuk bisa diakomodir oleh instansi tersebut. "Tentunya saya akan komunikasikan langsung, agar titik yang memerlukan PJU bisa terakomodir," tandasnya. (adv/and)



ADE/MKR

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin.

Ini Dia Penyebab Anjloknya Harga Rumput Laut

TARAKAN – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin mengungkapkan sejumlah penyebab anjloknya harga rumput laut. Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media usai aksi demo di Gedung DPRD Tarakan, Senin (23/10/2023).

Dia mengatakan salah satu penyebab anjloknya harga rumput laut, adanya isu global perang dunia termasuk Covid-19 yang sudah mereda namun masih berdampak.

“Jadi mereka masyarakat di luar negeri, sampaikan lebih pilih makanan bergizi. Untuk makanan tambahan meningkatkan gizi, mereka syukur selesaikan kebutuhan pokok saja, nasi dan gandum tidak cukup dan berkurang di situ. Itu informasi kami dapatkan, jadi ada penurunan permintaan,” paparnya.

Singkatnya, industri-industri yang membeli rumput laut mengurangi permintaan atau demand. Negara pembeli rumput laut (buyer) saat ini mayoritas berasal dari China.

Kemudian, adanya biaya ongkir yang cukup tinggi. Jika diterapkan penjualan dari Tarakan langsung menuju Cina maka itu lebih bagus.

“Kegiatan ekspor semua sekarang lewat Makassar atau Jawa Timur. Tapi

kalau bisa langsung ekspor itu bagus. Tapi pergerakan kapal saya belum kuasai, alur pelayaran mungkin dari Pelindo, KSOP bisa menjadikan pelabuhan Tarakan bisa ekspor langsung ke negara buyer, setahu kami semua lewat Makassar dan Surabaya,” paparnya.

Informasi yang dia terima, harga dari Tarakan ke Surabaya. Lalu Surabaya ke buyer lebih mahal biaya ongkos pengiriman container. Dia menyampaikan persoalan harga Rp17.700 per kg yang dijual buyer ke China, sehingga ada pemotongan harga distribusi, container. “Pemotongan container Rp2.500, anggaplah kena Rp 15 ribu di Makassar, sampai di Tarakan bisa dihitung berapa, pengiriman lagi, kena Rp 3 ribu misalnya, maka betul saja. Dan berdasarkan kadar kekeringan juga jangan sampai kategori basah dikirim juga, kita jaga kualitas,” tegasnya.

Persoalan rumput laut lainnya, kata Rukhi, terdapat masalah dari hulu sampai hilir. Misalnya dari hulu, persoalan pemukat rumput laut dan termasuk masih ada rumput laut hilang dicuri. Kemudian, persoalan pembudidaya rumput laut dan zonasi, banyak alur pelayaran tertutup. “Ini juga perlu dibenahi dan ketiga, paling utama kualitas rumput laut. Ke depan

bagaimana sumber bibit berkualitas disiapkan dan itu kita benahi semua, sama-sama. Jujur saja, saya mewakili Pak Gubernur Kaltara yang tidak bisa hadir, beliau pesan tolong jaga rumput laut ini,” katanya.

Dia tak menampik mayoritas komoditas di Kaltara adalah rumput laut. Hasil dari komoditas itu telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara. “Mari sampaikan elegan, melalui DPRD Kabupaten dan kalau tidak puas ke level provinsi,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah Kota Tarakan dan Provinsi komitmen memperhatikan para petani rumput laut sehingga nantinya bisa dikembangkan. Salah satunya komitmen seluruh OPD masuk ke ranahnya. “Kembali ke UUD kita, pasal 33 ayat 3, bumi, air dikuasai negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengatur, masyarakat diatur, dan menikmati,” ucapnya. Untuk itu, menurutnya, persoalan anjloknya harga rumput laut harus diselesaikan dengan melibatkan semua stakeholders terkait, baik masyarakat maupun pemerintah. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Yulius Dinandus: Wewenang dan Regulasi Rumput Laut Ada di Provinsi

TARAKAN - Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir (Beraksi) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Tarakan, Senin (23/10/2023). Mereka menuntut Pemerintah Daerah Kaltara untuk mengatasi anjloknya harga rumput laut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus mengatakan, sesuai surat yang masuk ke Kantor DPRD, massa akan melakukan aksi mulai dari Stadion Datu Adil, Kantor Walikota dan DPRD Tarakan. Menurutnya, wewenang dan regulasi harga rumput laut berada di provinsi.

"Inti dari surat yang masuk adalah anjloknya harga rumput laut. Jika berbicara wewenang dan regulasi itu ada di Provinsi. Namun karena ini masyarakat ingin menyampaikan aspirasi maka kami temui," kata Yulius, Senin (23/10/2023).

Yulius Dinandus mengatakan, bahwa dia sempat menemui massa namun ditolak koordinator aksi. Alasannya, mereka enggan menyampaikan tuntutan jika tidak menghadirkan Gubernur Kaltara, DPRD Provinsi dan Wali Kota Tarakan.

Namun, Yulius enggan menurutinya karena DPRD Kota tak memiliki wewenang untuk menghadirkan

mereka. "Bapak pergi saja jika tidak bisa menghadirkan Gubernur, Walikota dan DPRD Provinsi," kata Koordinator Aksi. Ya sudah, saya pamit pergi dan silahkan lanjutkan aksinya," lanjutnya.

Dijelaskan Yulius, saat menemui massa, dia sempat menawarkan tiga hal kepada koordinator aksi. "Saat diluar, saya menawarkan tiga hal. Apakah akan menyampaikan aspirasi di jalanan sini, apakah di halaman DPRD atau perwakilan ke atas di ruang rapat. Saya layani," ujarnya.

Menurutnya, jika mahasiswa dan perwakilan petani rumput laut ingin mencari solusi terkait anjloknya harga rumput laut. Maka seharusnya mereka sampaikan aksinya di DPRD Tarakan. Dia berjanji akan mendampingi hingga ke provinsi dengan jalur yang tepat. Dikatakannya, mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya paham alur kebijakan tersebut.

"Saya kira mereka tahu jalurnya ke mana. Mudah-mudahan mereka berpikiran positif jika memang orientasinya membantu petani rumput laut. Bukan mencari heboh-heboh," ungkapnya.

Yulius menyebut tidak ada pemerintah yang ingin masyarakatnya punya masalah. Untuk itu, dia mengajak

semua pihak untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Saat disinggung, mengenai tuntutan massa aksi, Yulius mengaku tidak tahu pasti. Sebab, belum ada tuntutan yang disampaikan.

"Tuntutan belum ada sama sekali namun orientasinya mengenai harga rumput laut," tuturnya.

Saat disinggung mengenai masalah rumput laut di Tarakan, Yulius tidak menjelaskan secara gamblang. Menurutnya, dari beberapa berita dan artikel yang dia dipelajari. Secara garis besar harga memang anjlok. "Namun saya tidak mau mendahului. Juga ada masalah lain yang muncul terkait dengan pemasaran rumput laut," ungkapnya.

Akan tetapi, satu hal yang ditegaskan Yulius mengenai masalah rumput laut. Pemerintah Daerah masing-masing memiliki kewenangan dengan regulasi yang ada.

"Jadi begini, wewenang itu masing-masing ada di daerah. Karena ada regulasi kita. Apakah DPRD bisa ikut memberikan pendapat dan mende-sak, ya bisa. Itu dengan metode dan cara-cara yang tepat. maka saya kira akan diterima," tegasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus



Suasana demo di depan gedung DPRD Tarakan.

ADE/MKR

Demo ke DPRD Tarakan, Aliansi Beraksi Tuntut Kenaikan Harga Rumput Laut

TARAKAN - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir (Beraksi) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Tarakan, Senin (23/10/2023) pagi. Mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan harga rumput laut di Kota Tarakan.

Dari pantauan di lapangan, massa melakukan aksi sekira pukul 09.00-12.00 Wita. Demonstrasi dilakukan dengan melakukan orasi, bakar ban serta aksi blokade jalan.

Koordinator Lapangan, Fadhil Qobus mengatakan ada tiga tuntutan dalam aksi demonstrasi. Yang pertama, meminta pemerintahan terkait untuk merealisasikan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kedua, mendesak pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai stabilitas harga rumput laut.

“Dan yang terakhir meminta Gubernur Kalimantan Utara dan Wali Kota Tarakan menandatangani surat perjanjian masa aksi,” ucapnya ditemui di lokasi demo, Senin (23/10/2023).

Menurutnya, harga rumput laut

saat ini sudah sangat anjlok. “Harga sekarang sekitar Rp 9.000- Rp 10.000. Bulan lalu bahkan Rp 5.000,” ungkapnya.

Berdasarkan data harga ekspor yang diterimanya, pada Triwulan II mencapai Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu. Namun, realistis di Tarakan harganya mengalami penurunan. Menurutnya, penurunan harga rumput laut ini menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.

“Jangankan mendapatkan keuntungan, balik modal saja tidak. Akhirnya masyarakat utang sana utang sini. Saya kira ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Aliansi Beraksi (Bersatu Bersama Rakyat pesisir) menyatakan Mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat daerah Kaltara. Adapun isi mosi tidak percaya itu meliputi pemerintah dan wakil rakyat daerah Kaltara telah gagal dalam menjalankan amanat amandemen pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat. “Dibuktikan dengan tidak selesainya persoalan rumput laut yang berdampak pada kes-

ejahteraan umum. Fasilitas umum yang terbengkalai dan pendidikan yang tidak diutamakan. Serta sektor kesehatan yang lemah.

Dua, pemerintah dan wakil rakyat daerah Kaltara telah absen atau menjauhkan diri dari persoalan rumput laut. Hal ini dibuktikan dengan tidak direalisasinya UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta pertanggungjawaban terhadap stabilitas harga rumput laut. Ketiga, pemerintah dan wakil rakyat daerah Kaltara telah gagal mengakomodir kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat oleh masyarakat. Dibuktikan dengan tidak hadirnya Gubernur Kaltara, Wali Kota Tadarakan dan asosiasi pengusaha rumput laut Tarakan.

“Sebagaimana disebutkan pernyataan yang disebutkan tadi, maka Aliansi Beraksi menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat daerah Kaltara,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Aktivitas di lokasi pembangunan KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi, oleh pemerintah daerah, soal retribusi beberapa waktu lalu.

Relokasi Warga Belum Temukan Kata Sepakat

TANJUNG SELOR— Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, mengharuskan masyarakat Kampung Baru direlokasi.

Mereka direlokasi, merupakan dampak langsung karena adanya perluasan kawasan pembangunan KIHI, yang telah bergerak saat ini. Namun, untuk proses relokasi, hingga hari ini belum ber progres di lapangan.

Hal itu, dibenarkan oleh Camat Tanjung Palas Timur, Gafar bahwasanya pengelola kawasan belum merelokasi warga yang terdampak pembangunan kawasan industri.

Sehingga, aktivitas masyarakat di Kampung Baru tetap berjalan normal. Karena belum menemukan kata sepakat, soal relokasi tersebut dia meminta adanya peran dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi ikut mengambil bagian, menyelesaikan persoalan ini, sehingga dapat segera tuntas dan pembangunan berjalan lancar.

“Kita harapkan peran serta Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara, untuk menyelesaikan persoalan ini. Khususnya berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat,” ujar Gafar,

Senin (23/10/2023).

Dengan begitu, masyarakat dapat menerima terkait rencana relokasi tersebut. Jika ini diabaikan bukan tidak mungkin warga menolak untuk direlokasi. Untuk itu, perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan pemahaman bagi warga.

Pasalnya, lahan yang di relokasi di Desa Mangkupadi sudah disiapkan seluas 50 hektare. Namun, sampai saat ini belum ada penambahan untuk luasan lahan relokasi. Dan saat ini, juga belum ada pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengelola kawasan.

Camat Tanjung Palas Timur ini mempertanyakan, bagaimana warga mau direlokasi, kalau belum ada pembangunan yang dilakukan oleh pengelola kawasan.

“Pengelola kawasan, akan sulit untuk melakukan pembangunan jika lahan warga belum dibebaskan oleh perusahaan,” tuturnya.

Persoalan ini sempat tersampaikan ke Bupati Bulungan, Syarwani bahwa untuk rencana relokasi warga yang terdampak pembangunan KIHI saat ini tengah dalam tahap sosialisasi.

Orang nomor satu di Bulungan ini menegaskan, sebelum melaku-

kan relokasi, harus mendengarkan keinginan warga setempat. “Ada dua konsep yang ditawarkan oleh pengelola kawasan, kepada warga yang terdampak pertama soal ganti untung dan kedua relokasi,” jelas Syarwani.

Dikatakan, hampir sebagian besar warga setempat ingin direlokasi, tapi sebagian lagi mau untuk diberikan kompensasi atau ganti untung.

Menurutnya, hal ini harus terinventarisasi by name by address terlebih dahulu sesuai nama dan alamatnya. Jangan sampai pengelola kawasan memutuskan untuk membuat kebijakan relokasi, ada warga yang enggan direlokasi.

Jika seperti itu, maka prosesnya akan lebih panjang. Kalaupun kebijakannya ganti untung tentu harus ada proses negosiasi, karena tidak mungkin warga bisa langsung menerima harga yang ditawarkan oleh pengelola kawasan.

Maka diperlukan, inventarisasi. Sehingga, pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai skedul yang sudah ditetapkan. **(tin/and)**

Editor: Andhika



Personel Polda Kaltara, menunjukan foto personel yang diberikan sanksi PTDH.

8 Personel Polda Kaltara, Diberhentikan Tidak Hormat

TANJUNG SELOR - Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Irlen Daniel Aditya Jaya memimpin upacara pemberian penghargaan dan hukuman (reward dan punishment), terhadap jajarannya personel Polda Kaltara, Senin (23/10/2023).

Upacara tersebut berlangsung di halaman Mapolda Kaltara, yang diikuti oleh pejabat tinggi Polda Kaltara. Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan bagi personel yang berprestasi diberikan penghargaan. Dan sebaliknya, bagi personel yang melanggar kode etik profesi diberikan sanksi atau hukuman sesuai regulasi yang ada. Sanksi yang diberikan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Personel yang berprestasi kita berikan reward. Dengan telah melalui kinerja maksimal melalui pembinaan maupun fungsi operasi maupun fungsi lain melebihi tugas pokok,” ungkap Kapolda, Rabu (23/10/2023).

Kapolda menerangkan, terdapat 23 personel Polda Kaltara yang telah menunjukkan prestasi setelah melakukan assesment sesuai ketentuan, dan disimpulkan penilaian layak untuk mendapatkan penghargaan.

“Selamat kepada personel yang telah meraih prestasi, jadikan momentum ini sebagai ucapan terimakasih kepada keluarga yang telah mendukung prosesnya. Jangan puas diri dengan prestasi yang di dapat, terus tingkatkan etos kerja karena tanggungjawab kedepan semakin berat,” saran Kapolda.

Di kesempatan yang sama, Kapolda meminta terhadap personel yang belum meraih prestasi, untuk menjadikan momentum tersebut sebagai motivasi. Sehingga, dapat memacu kinerja kerja semakin lebih baik hingga memperoleh penghargaan demi membanggakan institusi polri yang dicintai.

Sebagai informasi, selain pemberian penghargaan bagi personel berprestasi, Kapolda juga memberikan sanksi bagi anggota polri yang melanggar kode etik profesi. Sanksi tegas diberikan berupa PTDH, terdapat 8 orang personel yang diberikan sanksi PTDH. Dengan rincian, 6 personel satker Polda Kaltara dan dua personel dari Polres Malinau.

Delapan personel yang diberikan sanksi PTDH, diantaranya, IPDA Sad Guna Siswadi, Bripka Kusnanto, Brigadir Inardi Susanto, Brigadir Eko Bagus Prasetyo, Briptu Hasbudi, Bripda Evan Indra, Bripda Muhamad Ansar dan Bripka Marzuki.

Sebelumnya, delapan personel tersebut telah dilakukan pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatan yang tercela dan menodai institusi polri. Namun, dalam praktiknya masih dilakukan pelanggaran fatal sehingga di jatuhkan sanksi.

“Apabila ada personel polri yang melakukan kode etik profesi dikenakan, konsekuensinya akan dilakukan PTDH. Hal ini dilakukan, sebagai upaya untuk memperbaiki citra polri khususnya marwah Polda Kaltara,” pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Personel Polda Kaltara mendapatkan penghargaan, diberikan langsung oleh Polda Kaltara, Irlen Daniel Aditya Jaya.



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

POLISI BONGKAR JARINGAN PENGEDAR SABU DI LONG IKIS

BACA HALAMAN 2



**BELAJAR DARI BPBD DIY,
PESERTA PELATIHAN TINGKATKAN
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KALTIM**

**WORKSHOP CORPU,
UPAYA MENINGKATKAN
KOMPETENSI ASN DI KALTIM**



**PERINGATI HARI SANTRI
NASIONAL, SANTRI
GANJAR SENAM
BERSAMA WARGA KUKAR
BACA HALAMAN 30**

Polres Paser Bongkar Jaringan Pengedar Sabu di Long Ikis

PASER - Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Paser kembali membongkar jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Long Ikis. Dari serangkaian operasi penyergapan, petugas meringkus dua tersangka pelaku masing-masing berinisial AT (39) dan AR (31). Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai maraknya transaksi narkoba di wilayah Long Ikis akhir-akhir ini.

Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi kemudian menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan yang dibantu anggota Polsek Long Ikis. "Atas informasi itu anggota melakukan penyelidikan" kata Suradi, Sabtu (21/10/2023).

Selanjutnya, petugas mendapati seorang pria yang belakangan diketahui berinisial AT di Desa Tajer Mulya, Kecamatan Longikis pada Kamis (19/10/2023). Saat itu, AT menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, sehingga petugas berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan.

Namun saat dihampiri, AT justru tampak sedang membuang benda yang ternyata berupa satu buah kotak lem dan dompet. Ketika diperiksa, petugas mendapati 1 plastik klip berisi sabu dari dalam kotak lem serta 5 plastik klip berisi sabu di dalam dompet. "AT sempat membuang barang bukti satu buah kotak lem dan dompet yang berisi paketan sabu," tukas Kasatresnarkoba.

Pasca melakukan interogasi terhadap AT, penyidik mendapat informasi bahwa barang bukti yang ditemukan bersumber dari AR. Petugas gabungan langsung bergerak memburunya.

AR terlacak sedang berada di rumahnya di desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara. Petugas lantas menyergap AR hingga menemukan sejumlah barang bukti sabu usai penggeledahan. "Tersangka pelaku terbukti menyimpan paket sabu sebanyak 23 paket yang disimpan di dalam tas selempang sebanyak 10 paket dan di dalam kotak sebanyak 13 paket," terang Suradi.

Dari rangkaian pengungkapan kasus, polisi berhasil menyita 67,88 gram sabu sabu siap edar dan uang tunai Rp13 juta yang diduga hasil transaksi gelap narkoba. "Anggota membawa AT dan AR beserta barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut ke Polres untuk diproses hukum lebih lanjut," tegasnya.

Atas kasus ini, AT dan AR sementara dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Apabila terbukti, AT dan AR bisa dikenakan hukuman pidana kurungan penjara selama 10 tahun.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



Tersangka dan barang bukti.



Spanduk Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN"

Besok, BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session Terkait Manajemen ASN dan Honorer dalam Revisi UU ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali akan menggelar Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN" pada Selasa (23/10/2023) besok pukul 10.00 - 12.00 Wita.

Menurut informasi yang didapat Mediakaltim.com, acara Sharing Session ke-44 ini akan diselenggarakan secara online atau daring dan bisa diakses melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube milik BPSDM Kaltim.

"Mari bergabung dalam pembahasan menarik dan interaktif di Sharing Session BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan tema: "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN"" bunyi tulisan yang disebar oleh pihak humas BPSDM Kaltim.

Narasumber yang akan dihadirkan dalam Sharing Session ini adalah Dr. Muhammad Taufiq, DEA selaku Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN (LAN RI).

Acara juga akan dibuka langsung oleh Dra. Nina Dewi,

M.AP selaku Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, acara langsung di Moderatori oleh Dr. H. Bere Ali, M.Si dari Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Para peserta yang mendaftar atau registrasi melalui link ini <https://bit.ly/shkbp sdmkaltim> akan mendapatkan Gratis E-Sertifikat

Berikut link zoom Sharing Session ke-44.

ID Zoom : 838 110 7674

Passeord Zoom : bpsdm

You Tube : BPSDM KALTIM

BPSDM Kaltim

is inviting you to a scheduled Join Zoom Meeting :

<https://us02web.zoom.us/j/8381107674?pwd=KzRx-ZHBYSUxVMlFVYVgXZk1WEdnQT09> (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dr. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
TD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Faskes Tingkat Pertama Menyediakan Layanan Konseling

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyediakan layanan konseling pada fasilitas kesehatan (Faskes) di tingkat pertama, yakni Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), agar meningkatkan kesehatan mental masyarakat.

“Layanan konseling sangat penting untuk mencegah dan menangani masalah mental, contoh depresi, stres, dan bunuh diri,” ungkap Kepala Dinkes Kaltim Dr. Jaya Mualimin, Senin (23/10/2023).

Ditambahkannya, faskes tingkat pertama mempunyai ruang konseling yang bisa memberikan bantuan psikologis kepada masyarakat,

terutama yang berkaitan dengan pelayanan keluarga dan reproduksi.

“Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DKP3A) agar mengintegrasikan layanan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Puspaga),” bebernya.

Kemudian, untuk rumah sakit yang telah direkomendasikan oleh Dinkes Kaltim yakni Rumah sakit Atma Husada, yang memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk menangani terkait kesehatan mental.

Jaya menuturkan, Dinkes Kaltim belum memiliki data resmi mengenai angka bunuh diri di Kaltim. Akan teta-

pi, prihatin dengan beberapa kasus bunuh diri yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di jembatan.

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan bunuh diri,” kata Jaya.

Salah satu caranya, dengan memasang jaring kawat di jembatan-jembatan yang rawan menjadi lokasi bunuh diri. “Kita juga akan meningkatkan literasi masyarakat tentang bahaya bunuh diri dan cara mengatasinya,” pungkasnya. (adv)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari

Dinkes Kaltim Targetkan SISROUTE di Tahun 2024

SAMARINDA- Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di seluruh kabupaten dan kota menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE). Sehingga Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pada 2024 mendatang.

“SISRUTE adalah sistem yang mengatur alur rujukan pasien dari Puskesmas ke rumah sakit atau sebaliknya. Sistem itu juga menyediakan informasi tentang ketersediaan tempat tidur, dokter, spesialis, dan alat kesehatan,” jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Senin (23/10/2023)

Lebih lanjut, tujuan dari SISRUTE adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil, atau sulit dijangkau.

Peningkatan pelayanan kesehatan primer berupa pembinaan praktik mandiri dokter, atau dokter gigi se-

suai standar layanan di kabupaten dan kota pada 2024.

Kemudian, target peningkatan Puskesmas yang menghadirkan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer sebesar 20 persen dari 188 puskesmas.

“Kami upayakan semua kabupaten dan kota melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerja mereka agar sesuai standar,” ujarnya.

Jaya juga menyatakan Unit Transfusi Darah (UTD) di Puskesmas mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan transfusi darah ditargetkan meningkat 15 persen.

“Saya berharap dengan target-target itu, kami dapat membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih manusiawi di Kaltim,” pungkasnya. (adv)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Jaya Mualimin



DP3A Kukar Siapkan Rekrutmen 9 Formasi Tenaga Teknis Profesional

TENGGARONG - Memaksimalkan peran, tugas dan fungsinya ,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Kartanegara (DP3A Kukar), membuka rekrutmen tenaga teknis profesional. Sebanyak 9 formasi yang disiapkan dalam pembukaan rekrutmen sejak tanggal 23-27 Oktober 2023.

Yakni diantaranya formasi Customer Service umum 1 orang, Customer Service untuk pengaduan 1 orang, Jurnalis sebanyak 1 orang, Programmer sebanyak 2 orang, Statistik sebanyak 1 orang, Konselor Hukum sebanyak 2 orang, Konselor Psikolog sebanyak 4 orang.

Selanjutnya Psikolog Kliniks sebanyak 2 orang dan Tenaga Teknis Teknologi Informasi (Tenaga IT) sebanyak 2 orang. Dengan total sebanyak 16 orang yang akan direkrut sebagai bagian dari DP3A Kukar.

“Merekrut tenaga teknis profesional secara semi terbuka untuk optimalisasi pelaksanaan tugas yang bersifat teknis profesi, sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pada DP3A Kukar,” tulis Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto, dalam Surat Pengumuman dengan Nomor P-718/DP3A/400.14.4.3/10/2023.

Sejumlah tahapan akan dilalui dalam proses rekrutmen. Yakni penerimaan berkas, dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi berkas lamaran dan pengumuman lulus seleksi tahap I pada tanggal 30 Oktober 2023. Bagi yang dinyatakan lulus verifikasi dan tahap I, akan mengikuti tes kompetensi dan pengumuman lulus seleksi tahap II pada 1 Nopember 2023.

DP3A Kukar pun kembali melanjutkan pada tes wawancara pada tang-

gal 3 Nopember 2023. Para peserta yang lulus akan mengikuti magang selama 5 hari sejak 6-10 Nopember 2023 dan pengumuman hasil akhir pada tanggal 14 Nopember 2023.

“(Rekrutmen) untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ses-

uai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan program kerja dan kegiatan pada DP3A Kukar,” tutup Bambang. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

PENGUMUMAN Seleksi Tenaga Teknis

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KUKAR

1. CUSTOMER SERVICE	1 ORANG
2. CUSTOMER SERVICE (PENGADUAN)	1 ORANG
3. JURNALIS	1 ORANG
4. PROGRAMER	2 ORANG
5. STATISTIK	1 ORANG
6. KONSELOR HUKUM	2 ORANG
7. KONSELOR PSIKOLOG	4 ORANG
8. PSIKOLOG KILINIKS	2 ORANG
9. TENAGA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI (TENAGA IT)	2 ORANG

Selengkapnya klik link berikut :
<https://dp3a.kukarkab.go.id//>

prokom kukar Prokom Kukar Pemkab Kukar PROKOM.KUKARKAB.GO.ID bangga melayani bangsa BerAKHLAK



ISTIMEWA

Suasana pertandingan pembuka turnamen Mini Soccer Bupati Cup 2023.

Turnamen Mini Soccer Bupati Kukar Cup Resmi Bergulir

TENGGARONG - Turnamen mini soccer Bupati Cup 2023 antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), resmi berjalan. Ditandai dengan pertandingan pembuka antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, pada Sabtu (21/10/2023), pekan lalu.

Ini menjadi perhelatan yang kedua kalinya, pada tahun 2022 lalu. Acara dibuka langsung oleh Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, di Lapangan Mini Soccer Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang.

Dalam sambutannya, Aji Ali ber-

harap bisa memberikan dampak positif bagi para peserta yang berasal dari seluruh OPD di Kukar. Terlebih, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kukar.

"Disadari ataupun tidak, kegiatan olahraga telah membuktikan dirinya sebagai instrumen yang efektif bagi kemanusiaan, termasuk dalam pembentukan nilai dan karakter diri seseorang," jelas Aji Ali.

Ia melanjutkan, olahraga memiliki peranan penting. Karena mengajarkan terkait kedisiplinan, tidak pantang menyerah, semangat kompetisi yang tinggi. Namun tetap mengajarkan nilai-nilai sportivitas. Ini akan

menjadi aset penting dalam menjalani aktivitas sebagai ASN di Kukar.

Maka dari itulah Pemkab Kukar memberikan apresiasi dan dukungan penuh dengan terselenggaranya turnamen Mini Soccer Bupati Cup 2023. Dan berharap akan terus terlaksana ditahun-tahun selanjutnya.

Dan yang tak kalah pentingnya, menjaga semangat perjuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Perjuangan untuk menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan. Dan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim

Kecamatan Tenggaraong Seberang Sukses Gelar MTQ Tingkat Kecamatan

TENGGARONG - Persiapan Kecamatan Tenggaraong Seberang, jelang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 tingkat Kabupaten di Kecamatan Kota Bangun Darat. Yakni dengan merampungkan MTQ tingkat kecamatan pekan lalu. Dengan menunjuk Desa Bhuana Jaya sebagai tuan rumah, pada tanggal 15-21 Oktober 2023.

"Yang jadi juara umum adalah tuan rumah, yaitu Desa Bhuana Jaya, malam minggu tadi penutupannya," ujar Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tenggaraong Seberang, Hendra Suryana, Senin (23/10/2023).

Efektif MTQ yang diselenggarakan di Desa Bhuana Jaya dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 17-19 Oktober 2023. Dengan diikuti oleh 300 kafilah dari 18 desa se-Kecamatan Tenggaraong Seberang.

Selanjutnya, bagi para pemenang



ISTIMEWA

Suasana MTQ tingkat Kecamatan Tenggaraong Seberang di Desa Bhuana Jaya.

akan diikutsertakan dalam MTQ ke-44 tingkat Kukar di Kecamatan Kota Bangun Darat. Namun masih menunggu kualifikasi dan batas umur untuk bisa ditetapkan menjadi peserta kafilah. Diketahui, MTQ ke-44 tingkat Kukar di Kecamatan Kota Ba-

ngun Darat akan dilaksanakan pada 9-16 November 2023.

"Harapannya banyak dari Tenggaraong Seberang untuk wakil Kukar ditingkat provinsi," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Festival Seni Budaya Nusantara Sukses Berikan Dampak Pada Pelaku UMKM Muara Badak

TENGGARONG - Puncak Festival Seni Budaya Nusantara, di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), berlangsung meriah. Musisi ternama asal ibu kota, Jamrud Band sukses menghentak ribuan penonton setia yang hadir di Lapangan Kantor Camat Muara Badak, pada Minggu (22/10/2023) malam.

Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, pun tidak bisa menutupi raut wajah bahagianya. Tidak hanya berhasil menghibur pecinta musik keras ala Jamrud Band saja, namun juga memberi berkah tersendiri bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan di sekitar lokasi acaranya.

Dibuktikan dengan tenant yang disiapkan oleh panitia untuk para pedagang, tidak menyisakan jajan sedikit pun hingga selesai acara. "Banyak daerah yang sudah mengikuti Kukar memberikan hiburan secara gratis tapi belum ada yang berkeliling ke kecamatan-kecamatan. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan multiplier effect," ungkap Rendi Solihin, Senin (23/10/2023).

"Saya senang pelaku UMKM laris manis, pedagang pentol laris, tolong juga dibeli jualan es tehnya," lanjutnya.

Terpisah, pelaku UMKM Aprianti, 28 tahun, pun sangat gembira. Karena selama festival konser berlangsung, dagangannya laris terjual. Dalam dua hari berjualan, ia berhasil meraih keuntungan hingga Rp 5 juta. "Keuntungan dari penjualan kali ini jauh lebih besar dari biasanya," jelasnya.

Aprianti berharap, acara serupa dapat terus dilaksanakan di Kecamatan Muara Badak. Karena acara yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat lokal.

"Kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kukar saat ini," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ISTIMEWA

Wabup Kukar, Rendi Solihin, saat memberikan sambutan pada acara Festival Seni Budaya Nusantara.

Safaruddin Sambangi Kukar, Bupati Paparkan Kondisi Kukar dan Strategi Percepatan Pembangunan

TENGGARONG - Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Safaruddin, melakukan kunjungan ke Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (23/10/2023). Kunjungan legislator yang pernah menjabat sebagai kapolda Kaltim ini, disambut dengan hangat oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Didampingi Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah. Dalam kesempatan ini, Edi Damansyah turut mengucapkan selamat datang untuk salah satu wakil Kaltim di Senayan tersebut.

"Selamat datang kepada Komisi III DPR RI, semoga kunjungan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah," kata Edi.

Dalam kesempatan ini, Edi turut memaparkan kondisi geografis Kukar yang memiliki luas 27.263,10 km² dan secara administratif terbagi atas 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 765.284 jiwa.

Berdasarkan kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata, Edi mengakui kondisi pembangunan pun masih belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah di Kukar.

Pertama, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran pemerintah desa (pemes), dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD).

Alokasi dana ini diberikan dalam bentuk program Rp 50 juta per RT yang dapat dipergunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar. Seperti penyediaan energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah.

"Implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022. Kami pun bangga, banyak kabupaten kota lain belajar BKKD Rp 50 juta per RT



ADY/RADAR KUKAR

Suasana kunjungan anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, ke Kukar.

ini ke Kukar," terangnya.

Strategi kedua dengan menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan alokasi dana kepada kecamatan dan kelurahan. Sehingga, camat pun memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan secara berkala pada tingkat kecamatan.

"Kedua strategi ini sekarang telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, yang terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif," terangnya.

Menurutnya, kedua strategi tersebut berdampak pada kebijakan makro. Ini terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Kukar pada tahun 2023 sebesar 0,77 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 0,74, dengan jumlah desa berstatus Mandiri 76 desa, Maju 69 desa, Berkembang 48 desa, dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

"Kami berharap kehadiran Komisi

III DPR RI ini, memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah. Sekaligus sebagai kepanjangan lidah dalam menyampaikan harapan dan aspirasi warga Kutai Kartanegara," harapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin, mengaku bersyukur bisa menyambangi Kukar. Menurutnya, ini merupakan agenda silaturahmi wakil rakyat dengan pemerintah daerah hingga perangkat desa kelurahan dan RT.

Ia berharap, RT dan lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat prasejahtera. Hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstrem maupun stunting tepat sasaran. Ia pun meminta, agar Pemkab Kukar memperkuat pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan. Mengingat, Kukar saat ini merupakan salah satu penyuplai bahan pangan terbesar di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas," tandasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



DISKOMINFO PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Pembukaan Lomba Balap Kapal Dompeng 2023 di Kelurahan Jenebora, Minggu (22/10/2023).

Pemkab PPU Apresiasi Lomba Balap Kapal Jenebora

PPU - Kelurahan Jenebora, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Lomba Balap Kapal Dompeng 2023. Pemkab PPU mengapresiasi tergelarnya kegiatan yang sudah dua kali diadakan tersebut.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Ahmad Usman membuka secara resmi perlombaan yang digelar di Dermaga Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Minggu, (22/10/2023). Atas nama Pemkab PPU, ia menyampaikan sambutan serta penghargaan tinggi pada segenap panitia penyelenggara.

"Kami merasa bangga karena kegiatan balapan kapal dompeng ini untuk yang kedua kalinya dilaksanakan di tempat ini. Selamat pada panitia, yang telah berupaya dan bekerja keras, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan meriah," ujarnya.

Usman berharap, kegiatan ini bisa rutin digelar tiap tahunnya. Kemu-

dian juga dapat menjadi ikon yang dapat dibanggakan daerah.

"Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang bukan hanya pelaksanaan balapan kapal dompeng saja yang bisa diselenggarakan, tetapi acara besar lainnya juga bisa kita selenggarakan di daerah ini," katanya.

Lanjutnya, pelaksanaan acara ini tentunya searah dengan geliatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai daerah penyangga Nusantara yang sedang giat membangun.

"Untuk itu mari kita dukung dengan menunjukkan kemampuan untuk bisa terlibat dalam membangun IKN sesuai dengan profesi masing-masing," tutur Usman.

Ia juga minta agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk IKN dan jangan hanya menjadi penonton. Masyarakat Kabupaten PPU harus berpendidikan, unggul, berkualitas, cerdas, kreatif, berdaya saing tinggi, berakhlak

mulia, serta berwawasan luas.

"Pemerintah Kabupaten PPU pasti memberi peluang dan kesempatan yang sama pada semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan IKN," lanjutnya.

Sementara itu Lurah Jenebora Syaryadi menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat Jenebora. Terkhusus untuk panitia, sponsor dan peserta yang telah mendukung kegiatan tersebut.

Ia juga berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat dan pengalaman berharga bagi semua khususnya masyarakat Jenebora. "Mari Kita nikmati acara ini dengan penuh semangat dan antusias. Selamat berlomba jaga sportivitas karena Kita semua bersaudara. Mari Kita dukung nelayan untuk maju dan sejahtera, hidup nelayan, hidup nelayan, hidup nelayan," tutur Syaryadi memberikan semangat warganya. (ADV/SBK)



HUMAS SETKAB PPU FOR MEDIKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat mendiskusikan beberapa hal bersama dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Minggu malam (22/10/2023).

Malam Ramah Tamah PJ Gubernur Kaltim di PPU, Makmur Diskusikan Percepatan Pembangunan

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar malam ramah tamah untuk Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Minggu malam, (22/10/2023). Dalam kesempatan itu, Pj Bupati PPU Makmur Marbun mendiskusikan terkait percepatan pembangunan di daerah.

Setelah siang Makmur memamerkan potensi wisata pantai di PPU dengan bermain jetski, acara yang digelar di Pantai Istana Amal Penajam, berlanjut hingga malam hari. Yaitu menjamu Akmal Malik beserta jajarannya dalam makan malam sekaligus ramah tamah.

Dalam malam yang penuh keakraban itu, turut dimeriahkan oleh penampilan eksklusif dari band akustik 2B yang berasal dari Kota Balikpapan. Dalam momentum itu pula, baik Makmur dan Akmal serta undangan yang hadir turut serta menyumbangkan lagu.

"Pantai Istana Amal yang indah menjadi latar belakang yang sempurna untuk acara ramah tamah dan makan malam ini," ujar Makmur.

Turut pula hadir dalam kegiatan itu, Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan, Komandan Kodim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi. Serta

kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Di sela-sela jamuan itu pula, Makmur sempat membuka diskusi terkait terkait percepatan pembangunan di PPU. Yang semua itu berhubungan langsung dengan persiapan daerah dalam menyambut dan mendukung pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Segala hal yang diperlukan dalam percepatan pembangunan di PPU, sebagai daerah pendukung IKN. Agar nantinya, daerah dan warga PPU tidak hanya jadi penonton saja," tutup Makmur. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menyerahkan penghargaan ke siswa berprestasi di ajang Nasional, Senin (23/10/2023).

Serahkan Penghargaan ke Siswa dan Sekolah Berprestasi, Pj Bupati PPU Bangun Kepercayaan Diri Bangun Daerah Maju

PPU - Siswa dan sekolah berprestasi di Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan penghargaan khusus dari Pemkab PPU. Dalam kesempatan itu, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun turut memberikan pesan semangat dan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Didampingi istrinya, yaitu Ketua TP-PPK PPU, Linda Romauli Siregar ia menyerahkan sejumlah penghargaan pada para pemenang lomba tingkat Nasional dalam program Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) PPU. Dilaksanakan usai apel pagi di lingkungan Setkab PPU, Senin, (23/10/2023).

Di antaranya adalah Piagam penghargaan kepada juara 1 kategori lomba bermain sambil bernyanyi pada pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat nasional ke 10, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) PPU. Ada juga penghargaan diberikan kepada SDN 013 sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 dan penghargaan kepada SDN 016, SPN 5 PPU, SMAN 5 PPU sebagai sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional 2023.

Adapun Makmur menuturkan PPU memiliki potensi yang besar untuk menjadi kabupaten yang maju di Kaltim. Banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan lebih jauh.

"Bapak ibu, Kita harus percaya diri karena ini tempat Kita. Kita bisa berbuat sesuatu untuk wilayah Kita ini. Jangan sampai menjadi penonton di daerah sendiri," katanya.

Bahkan, jika dibangun dengan sungguh-sungguh, ia memperkirakan ke depan PPU bisa mengalahkan Kota Balikpapan. Asal potensi di daerah ini dapat dikelola dengan baik.

"Ibarat sapu lidi, jika hanya satu lidi tidak ada gunanya, tetapi jika lidi bersatu pastilah luar bisa kuatnya. Ayo semua saling support. Kalau ada yang ingin maju ayo kita support, karena dengan itu kita telah memberikan kekuatan ke mereka," ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya minta kepada seluruh perangkat daerah di Pemkab PPU agar saling menjalin kerja sama yang baik untuk kemajuan PPU. "Ya, mungkin jika biasanya berjalan sedikit lambat, mulai saat ini langkah Kita bisa dipercepat untuk kemajuan daerah kita PPU," pungkas Makmur. (ADV/SBK)





YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Visitasi penilaian panji keberhasilan bidang perpustakaan oleh tim juri di Kota Bontang.

Visitasi Tim Juri DPK Provinsi Kaltim Guna Penilaian Panji Keberhasilan Perpustakaan Bontang

BONTANG – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang mendapatkan kunjungan penilaian dari tim juri visitasi panji keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltim. Kunjungan ini, untuk melihat dan menilai langsung keberadaan perpustakaan dalam bidang panji keberhasilan bidang perpustakaan.

Ketua Tim Juri Penilaian, Ardiningsih mengatakan visitasi merupakan rangkaian dalam penilaian lanjutan dari administrasi dan sebagai unsur pembinaan kepada perpustakaan di wilayah Kalimantan Timur. Ia mengatakan visitasi juga sebagai evaluasi dalam panji keberhasilan perpustakaan Kota Bontang yang telah dilihat sebelumnya melalui administrasi.

“Ada indikator dan implementasi untuk dilihat secara langsung. Selain sebagai unsur pembinaan, ada juga reward dalam menjalankan perpustakaan,” kata Ardiningsih, Senin (23/10/2023).

Selain itu, Ardiningsih mengatakan pengembangan layanan inovasi perpustakaan seperti layanan digital harus terus dikembangkan. “Pengembangan layanan digital di perpustakaan terus dilaksanakan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan perpustakaan Bontang telah mendapatkan panji keberhasilan pembangunan bidang perpustakaan. Selain itu, Najirah menekankan fungsi perpustakaan semakin maju dalam pengembangan layanan setiap tahunnya.

“Semoga DPK tetap bisa mempertahankan dalam predikat panji keberhasilan. Karena banyak inovasi yang dilakukan DPK,” kata Najirah.

Peningkatan pelayanan yang dilakukan DPK, kata Najirah sebagai bentuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bontang dan melakukan inovasi sebagai bentuk pelayanan maksimal.

“Penilaian panji keberhasilan bidang perpustakaan sebagai momen yang tepat dalam menilai kinerja dinas perpustakaan dan kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan minat dan baca,” kata Najirah.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Kepala Desa Loa Duri Ilir H Fakri Arsyad



Sekretaris Desa Loa Duri Ilir Muhammad Husin

Desa Loa Duri Ilir Sambut Positif Program TP-BIS Nasional

TENGGARONG - Pemerintah Desa Loa Duri Ilir menyambut baik program nasional pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TP-BIS) yang akan digalakkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Loa Duri Ilir H Fakri Arsyad yang diwakili oleh Sekretaris Desa Loa Duri Ilir Muhammad Husin saat ditemui oleh Mediakaltim di ruangannya, Senin (23/10/2023).

"Kami sangat antusias, dari segi program, karena sangat sesuai dengan program Desa sebelumnya, pemberdayaan sosial dari berbagai aspek," ungkapnya.

Sebuah desa yang terletak di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ini, sudah mempersiapkan beberapa hal untuk menjalankan program TP-BIS. Yakni, baik dari segi sarana dan

prasarana serta koleksi buku yang ada di perpustakaan desa.

"Kita sudah menggelar beberapa kegiatan persiapan, seperti kegiatan pelatihan Barista atau pembuatan coffee, pembuatan snack baby fish, atau anak ikan yang diolah jadi snack. Kegiatan ini untuk dijadikan role model dari kabupaten. Ke depannya, kita akan mengadakan sendiri di desa ini untuk memperdayakan masyarakat dan membuat peluang-peluang usaha," jelasnya.

Dari program TP-BIS ini, Arsyad dan Husin berharap akan berdampak positif untuk pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Loa Duri Ilir yang berjumlah kurang lebih 14.000 jiwa lebih ini, agar masyarakat bisa lebih sejahtera dan memiliki wawasan yang luas.

"Harapannya program ini terus dikembangkan, untuk pengkaderan perpustakaan. Dan kita juga sudah

kirim Pustakawan, untuk pelatihan beberapa kali keluar daerah, agar nanti muncul inovasi buat menjalankan program," terangnya.

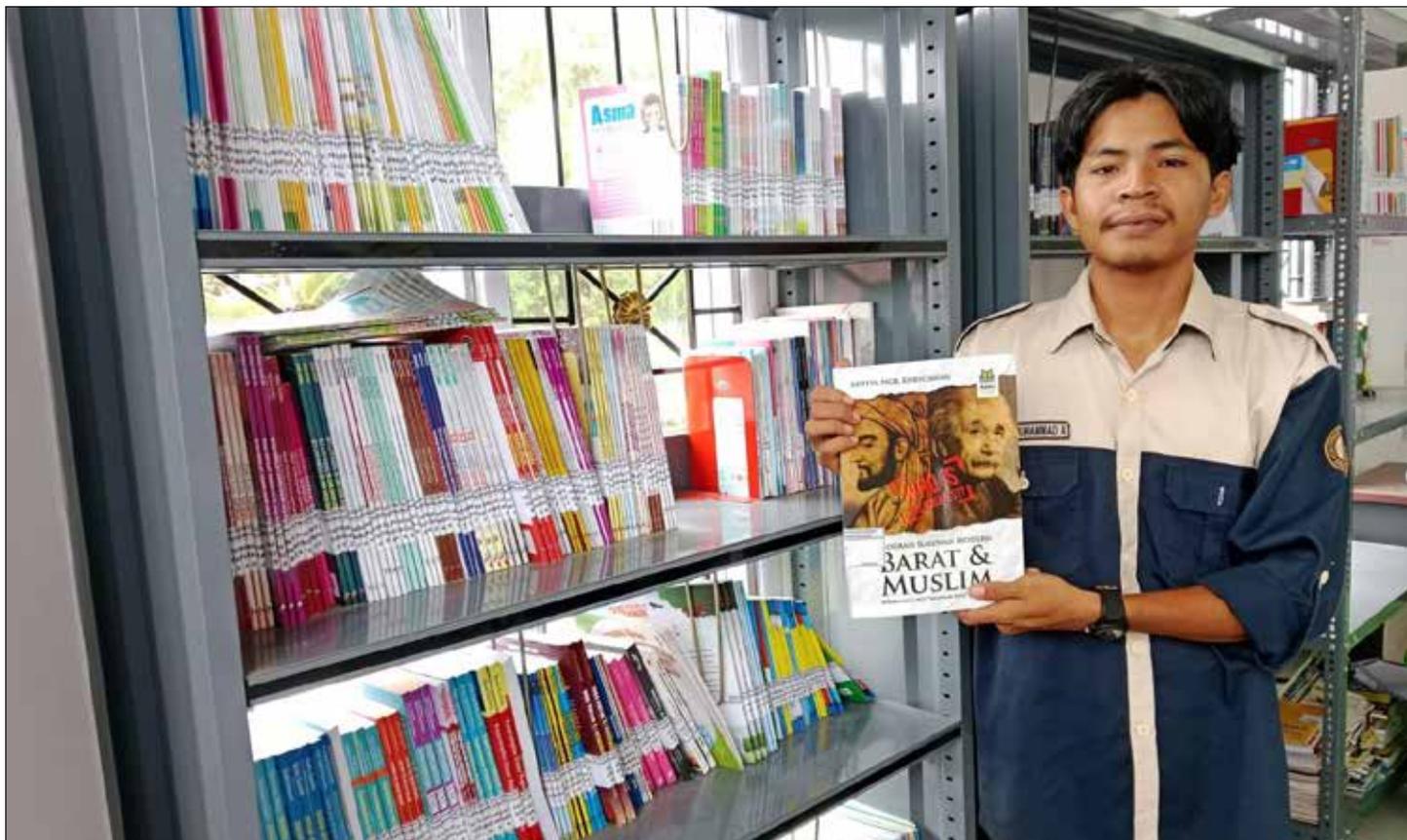
Diketahui, Program TP-BIS termasuk ke dalam program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perpustakaan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Pustakawan Ahli Muda, DPKD Kaltim Nikko Dwi Angga menyebutkan program ini memungkinkan untuk mengubah paradigma bahwa perpustakaan bukan hanya gudang buku, tapi juga sebagai tempat untuk mensejahterakan masyarakat.

Dan DPKD Kaltim berencana akan menggalakkan program TP-BIS ini ke perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan yang ada di Kalimantan Timur. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Desa Loa Duri Ilir Andi Muhammad Arsyad.

Perpustakaan Desa Loa Duri Rutin Gelar Kegiatan Guna Kembangkan Budaya Literasi

TENGGARONG-Demimeningkatkan budaya literasi masyarakat, Perpustakaan Desa Loa Duri Ilir yang berada di komplek perkantoran Desa Loa Duri Ilir, Jalan Kampung Jawa, Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara, selalu menggelar kegiatan literasi. Hal ini dikatakan oleh Pustakawan Desa Loa Duri Ilir Andi Muhammad Arsyad.

"Salah satu upaya kami agar menarik masyarakat untuk ke perpustakaan adalah dengan menggelar pelatihan dan perlombaan," ujarnya pada Senin (23/10/2023).

Pelatihan yang sudah digelar ada beberapa pelatihan yang muaranya adalah penciptaan jiwa kewirausahaan pada masyarakat. Yakni, seperti pelatihan pembuat kopi profesional yang bisa disebut Barista, juga pelatihan pengolahan makanan snack dan pengemasannya. "Besok Selasa (24/10/2023) kita juga adakan pelatihan pembuatan konten digital," katanya.

Saat ini kata Andi, pihak perpustakaan akan memfokuskan untuk meningkat-

kan budaya literasi untuk anak-anak jenjang sekolah SD, SMP dan SMA.

"Kita fokus untuk anak sekolah, karena agar melatih kebiasaan anak untuk membaca. Oleh sebab itu saya akan rapatkan dengan sekretaris untuk membuat lomba-lomba pengembangan literasi, seperti lomba puisi, lomba mendongeng, lomba bertutur dan lomba berpantun," paparnya.

Hal ini dilakukan agar mendongkrak budaya membaca di kalangan masyarakat desa yang berpenduduk 14.000 jiwa ini.

"Kendala kita memang rendahnya budaya membaca, karena era digital masyarakat banyak teralihkan ke handphone. Oleh sebab itu kita memancing masyarakat untuk menambah wawasannya kita adakan pelatihan," tukasnya.

Diketahui saat ini, perpustakaan Desa Loa Duri Ilir memiliki 2.500 eksemplar koleksi buku, dengan bermacam tema seperti agama, fiksi, budidaya ternak, budidaya tanaman, buku cerita anak, otomotif dan buku pelajaran sekolah.

"Kita baru juga mendapatkan bantuan sapras dari Perpustakaan Nasional, yakni satu rak buku tambahan, dan 3 komputer. Pihak desa menambah wifi satu, dan bangunan kita ini tergolong baru dibangun tahun 2021 dibangunkan oleh Pemkab," terangnya.

Andi berharap pihak desa bisa menambah karyawan khusus Perpustakaan. Karena jika sesuai aturan, perpustakaan desa minimal ada 5 orang pustakawan, agar adanya pembagian tugas dan bisa memajukan perpustakaan desa.

"Saya butuh tambahan karyawan, biar ada yang fokus promosi dan ada yang fokus pelayanan. Saya pun berharap intinya perpustakaan ini bukan hanya menjadi gudang buku dan tempat baca, tapi bisa dijadikan wadah mengekspresikan diri agar anak-anak bisa berkembang potensi literasinya," pungkasnya. (ADV/Han/DPKD)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Harap Anak Muda Ikut Berperan Kembangan Sektor Pertanian

TANJUNG REDEB – Minimnya minat anak muda terjun ke sektor pertanian atau perkebunan disorot Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

Dia mengatakan, saat ini petani didominasi masyarakat lanjut usia. Maka dari itu, regenerasi dibutuhkan agar tanaman pangan dapat berumur panjang dan tidak bergantung dari pasokan luar. "Apalagi saat ini pemerintah sudah mewajibkan untuk mengonsumsi beras lokal. Kalau tidak ada regenerasi, kita khawatir program tersebut tidak jangka panjang," ungkapnya.

Menurutnya, kurangnya minat anak muda terjun ke perkebunan maupun pertanian karena dinilai kurang menjanjikan dari segi ekonomis.

"Seharusnya ada upaya dari pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaparkan potensi pertanian atau perkebunan kepada anak muda, sebagai penarik minat mereka," tuturnya.

Sakirman menerangkan, seiring dengan semakin modernnya teknologi pertanian, dibutuhkan anak muda yang melek teknologi agar memudahkan petani mengelola pertaniannya.

"Tentu ini harus jadi perhatian, bagaimana caranya pemerintah bisa menarik anak muda terjun ke pertanian maupun perkebunan," katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Berau ini menjelaskan, DPRD mendukung segala kebutuhan petani. Apalagi, jika melihat pertanian di Pulau Jawa yang jauh lebih maju karena pengolahan pertaniannya sudah berbasis teknologi.

"Saya ingin hal itu juga bisa terjadi di Berau. Melalui teknologi, saya rasa bisa menarik minat anak muda untuk bertani meneruskan usaha orang



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

tuanya yang juga sebagai petani," sebutnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, jika teknologi pertanian yang ada tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, dikhawatirkan alih fungsi pertanian terjadi. "Tentu kita tidak ingin lahan pertanian yang ada berubah menjadi hamparan perkebunan," tegasnya.

Dirinya menekankan, kondisi tersebut harus jadi catatan pemerintah jika ingin pertanian tetap dominan di Berau. Terlebih kabupaten paling utara Kaltim ini memiliki sekolah tinggi pertanian yang diharapkan bisa bekerja sama untuk melakukan pendampingan petani di lapangan.

"Kami ingin petani kita jadi kaya,

dan makmur. Tentunya dengan dukungan pemerintah daerah. Pertanian kita harus diubah menjadi modern, jangan lagi pakai sistem lama," imbuhnya.

Kendati demikian, Sakirman juga mengaku telah beberapa kali menyampaikan hal tersebut pada saat pelaksanaan Musrenbang dan ke OPD terkait agar lebih serius dalam mengelola pertanian serta membantu Alsintan yang berteknologi modern di setiap tahunnya.

"Tentu pengadaannya juga harus disupport. Saya harap generasi muda kita juga mengoptimalkan peran serta mereka dalam mengelola sektor pertanian kita saat ini," pungkasnya. (adv/dez)

Darlina: Pemerintah Harus Tegas Tindak Aktivitas Illegal Fishing

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlina mendorong pemerintah memaksimalkan pengawasan dan pengamanan terhadap illegal fishing. Ia menuturkan, agar pengawasan dapat maksimal, pemerintah harus membangun pos penjagaan. “Sehingga nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang salah bisa segera ditindak,” ungkapnya.

Illegal fishing, kata Darlina, jika dibiarkan berlarut-larut dapat merusak ekosistem laut, sehingga perlu perhatian serius antar seluruh pihak. “Saya apresiasi upaya pemerintah karena sudah rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya untuk mengingatkan masyarakat terkait masalah ini,” ucapnya.

Darlina menilai, selain memengaruhi ekosistem laut, illegal fishing juga akan mematikan sektor pariwisata. Sebab keindahan destinasi wisata dapat rusak akibat pengeboman ikan. “Banyak dampak buruknya, kualitas ikan juga jadi tidak bagus,” imbuhnya.

Politikus Partai NasDem ini juga mendukung dan memberdayakan para nelayan dengan memberikan bantuan berupa mesin ketinting dan mesin dompeng untuk memudahkan para nelayan untuk pergi ke laut. “Dari reses tiap tahunnya kita akan realisasikan bantuan ini dari masyarakat baik di anggaran murni maupun perubahan,” bebarnya.

Darlina berharap, dengan adanya peraturan yang dibuat secara khusus, bisa berpengaruh besar ke masyarakat, khususnya para nelayan. “Tentu, bersama-sama menjaga laut Berau ini,” tutupnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlina

Minta Pemerintah Realisasikan Pembangunan Jembatan Kelay III



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto mengusulkan pembangunan Jembatan Kelay III diprioritaskan pada 2024 mendatang.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap. “Jembatan kelay III ini merupakan prioritas dari Komisi III. Dari usulan akan dilakukan bertahap dan langkah pertama akan dilakukan pembebasan lahan, kemudian dibangun pondasi dahulu,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, anggaran yang akan dikucurkan nantinya terbilang cukup besar, yakni Rp 200 miliar hingga jembatan rampung dibangun.

Menurutnya, pembangunan secara bertahap karena untuk menekan beban anggaran dari Pemkab Berau nantinya. “Jadi langkah kami, sementara jembatan yang ada masih bisa dipakai, mungkin tahun ini akan dilakukan pondasi dahulu atau langkah pertama bisa dibebaskan lahan,” paparnya.

“Kita tidak sekaligus menganggarkan sebesar itu. Jadi tahap demi tahap agar tidak membebani APBD kita,” tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno

Dinilai Penting, Minta Pemerintah Realisasikan SD Filial

TANJUNGREDEB – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno mendorong pemerintah memaksimalkan infrastruktur penunjang pendidikan. Tujuannya agar sektor tersebut lebih maju.

Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memikirkan kemajuan dunia pendidikan Bumi Batiwakkal.

Berkaitan dengan hal itu, dirinya mengusulkan pembangunan SD Filial di Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur. Usulan tersebut ditegaskannya harus diprioritaskan.

Suharno menerangkan, usulan itu disampikannya bukan tanpa sebab.

Pasalnya sekolah yang ada cukup jauh, bahkan para pelajar harus menempuh jarak sekisar 9 kilometer.

“Pada intinya yang utama harus ditingkatkan adalah infrastruktur, jika infrastrukturnya memadai, saya yakin kualitas pendidikan kita juga akan semakin meningkat,” tuturnya.

Menurutnya, karena jarak tempuh menuju sekolah yang cukup jauh, membuat sebagian orang tua siswa terbebani. “Apalagi mereka bekerja di kebun, tentu dengan antar jemput sekolah merasa berat. Jadi saya harap SD Filial ini direalisasikan,” katanya.

Tak hanya itu, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku sudah pernah melakukan

pengecekan ke lokasi yang telah diusulkan untuk pembangunan SD Filial tersebut lalu.

Adapun luas lahan yang diwakafkan oleh pemerintah kampung kepada Pemkab Berau adalah sekitar 4 hektare. Begitu juga untuk perencanaan telah dianggarkan pada tahun 2022 dan menunggu penganggaran untuk pembangunannya.

“Semoga rencana pembangunan SD Filial ini bisa segera direalisasikan, agar masyarakat di Labanan Makmur dan Labanan Jaya, bisa segera menikmati fasilitas pendidikan yang tidak jauh dari pemukiman mereka,” tandasnya. (adv/dez)

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbaikpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982



Kunjungan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian di SMAN 2 Berau.

Syarifatul Dampingi Hetifah Berikan 15 Ribu Beasiswa PIP di Berau

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah dan Sekretaris Komisi I DPRD Berau dan Sri Kumalasari mendampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian berkunjung sekaligus secara simbolis memberikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para penerima dari berbagai tingkatan sekolah, di SMAN 2 Berau.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian telah menyiapkan sebanyak 15.000 kuota beasiswa PIP bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Berau. Yang terbagi menjadi gelombang pertama 10.000 kuota dan kedua sebanyak 5.000 kuota.

Beasiswa tersebut ditargetkan untuk mendorong minat belajar dan membantu kelancaran pendidikan bagi pelajar yang menerimanya. Apalagi Berau masuk dalam KSPN sehingga perlu memiliki SDM yang unggul di bidang akademik.

"Tadi saya sudah mendengar usulan dan masukan terkait beasiswa PIP, tentunya menjadi catatan khusus untuk menjadi bahan evaluasi

ke depannya," terang Hetifah.

Meski saat ini pendidikan sudah gratis, namun diakuinya kebutuhan pendukung pembelajaran tetap perlu dipenuhi secara pribadi. Sehingga melalui beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu penerima yang membutuhkan.

"Saat ini kami juga tengah berupaya mempercepat pencairan beasiswa PIP untuk Berau. Kita juga akan dorong perbankan untuk jemput bola ke pelajar yang jauh dari akses menuju perbankan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, dirinya mewakili DPRD Berau berterima kasih kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang berkenan turun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil), khususnya di Kabupaten Berau.

"Ini merupakan bentuk perhatian yang diberikan kepada kita, khususnya pemberian beasiswa bagi pelajar di Kabupaten Berau," ungkapnya.

Ia pribadi juga mengapresiasi perhatian yang diberikan sebagai

bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan melalui beasiswa PIP tersebut. Masyarakat yang menginginkan anaknya mendapatkan beasiswa bisa mengusulkan melalui perwakilan rakyat, yakni Hetifah.

"Kami dari DPRD Berau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hetifah yang memberikan aspirasinya berupa beasiswa untuk siswa-siswi di Bumi Batiwakkal," ucapnya.

Syarifatul berharap, anak-anak di Kabupaten Berau tidak ada lagi yang tidak bersekolah atau sampai putus sekolah. Pasalnya, pemerintah tidak memungut biaya apapun untuk sekolah. Yang ada malah memberikan beasiswa berupa PIP ini.

"Semoga para pelajar di Berau kelak menjadi generasi yang membanggakan orangtua dan membawa nama baik sekolah hingga sukses di masa yang akan datang," harapnya. (Adv)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Tengah, Ardiansyah

Ardiasnyah Minta Kejelasan Disedikbud Soal Pembangunan Sekolah di Balteng

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan meminta kejelasan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar segera menentukan lokasi pembangunan sekolah baru di kawasan Kecamatan Balikpapan Tengah.

Pasalnya, hingga saat ini lokasi pembangunan sekolah baru di kawasan Balikpapan Tengah belum menemukan titik kejelasan. Meskipun anggaran fisik pembangunan sekolah telah dianggarkan sebesar Rp 30 miliar dari APBD Balikpapan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Tengah, Ardiansyah. "Hingga saat

ini belum mendapatkan info terbaru mengenai lokasi pembangunan sekolah baru untuk wilayah Balikpapan Tengah," ujarnya Senin (23/10/2023).

Ardiansyah menyebut, informasi terakhir yang diperolehnya jika lokasi pembangunan sekolah Balikpapan Tengah yang awalnya berada di kawasan Jokotole, akan dialihkan ke Lapangan Tenis Manuntung yang berada di Telaga Sari.

"Di mana aja tempatnya yang penting saya mau itu dibangun, karena anggaran pembangunan fisik sudah dianggarkan Rp 30 milyar. Intinya Balikpapan Tengah membutuhkan sekolah baru," jelasnya.

"Setidaknya jika sudah ada kepas-

tian lokasi maka sesegera mungkin DED diselesaikan," tambahnya.

Ardiansyah khawatir jika tidak ada kepastian lahan maka pembangunan sekolah tidak akan terealisasi. Mengingat lahan sekolah sudah ada dan merupakan aset Pemkot Balikpapan, jadi tidak ada alasan lagi sekolah tidak terbangun.

"Saya sebagai anggota dewan dapil Balikpapan Tengah sangat menyayangkan jika sekolah tidak terbangun, jangan sampai ada pergeseran anggaran lagi. Pasti saya protes," tutupnya. (ADV)

Pewartu : Aprianto
Editor : Nicha Ratnasari



YUSVA ALAM

Kadisdikbud Bambang Cipto Mulyono (tengah) saat raker terkait BCC 2023 bersama DPRD Bontang.

Disdikbud Keluhkan Kewenangan SMA/SMK di Provinsi, Sutarmin: Perkuat Kajian Sebagai Dasar Tuntutan

BONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengeluhkan kondisi SMA/SMK yang kewenangannya masih berada di Provinsi Kaltim. Lantaran kondisi tersebut pihaknya tidak bisa turut campur di SMK/SMK.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Bambang mengeluhkan kondisi ini, lantaran menyebabkan pihak-

nya tidak bisa memberikan bantuan atau memanfaatkan SMA/SMK untuk turut dalam memajukan Bontang. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa mengukur tingkat pendidikan warga Bontang, karena untuk mengukur berapa persen yang lulus atau diterima di kampus, dan sebagainya harus sampai tingkat pendidikan SMA/SMK.

“Saya sudah keluhkan hal ini ke Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dan juga Dirjend Pendidikan RI. Kami takut menyalahi kewenangan apabila melanggar aturan tersebut,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sutarmin menjelaskan, bahwa Komisi II DPRD

Bontang bersama DPRD Kukar pernah diundang oleh Komisi II DPR RI untuk membahas masalah ini salahsatunya.

Dikatakannya, untuk dapat mengembalikan kewenangan SMA/SMK ke daerah, maka harus memperkuat kajian. Sehingga memiliki dasar yang kuat untuk meminta kembalinya kewenangan SMA/SMK ke daerah.

“Tuntutannya harus berdasar yang kuat. Mungkin OPD terkait bisa berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk bekerjasama menyampaikan tuntutan dan alasan meminta kembalinya wewenang SMA/SMK ke daerah,” beber Sutarmin. (al/adv)

Pemkot Diminta Promosikan BCC di Media Nasional dan Internasional

BONTANG – Anggota DPRD Bontang meminta Pemkot Bontang untuk terus meningkatkan kualitas event Bontang City Carnival (BCC). Tidak hanya skala lokal namun mampu meningkat jadi skala nasional bahkan internasional.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Dijelaskan Pimpinan Rapat, Nursalam, bahwa pihaknya akan selalu mensupport apapun kebijakan pemerintah daerah, asalkan memberikan efek positif bagi masyarakat. Termasuk salahsatunya menggembangkan budaya-budaya lokal dan pari-

wisata yang ada.

Menurutnya, saat ini BCC sifatnya masih skala lokal, belum nasional bahkan internasional. Belum bisa menjadi perhatian wisatawan mancanegara (wisman) untuk datang melihat.

“Di Jember itu saya lihat sampai bule-bule datang menonton. Kalau kita hanya bikin BCC ini sebagai rutinitas akan sulit menarik minat wisman,” ujar Anggota Komisi II DPRD Bontang ini.

Bakhitiar Wakkang mengungkapkan hal yang sama. Agar BCC dapat berubah skalanya menjadi event internasional, menurutnya dibutuhkan publikasi di media-media nasional, bahkan media internasional.

Untuk dapat meningkatkan kualitas BCC tersebut, menurutnya lagi dibutuhkan juga kajian induk agar memiliki legal standing. Dengan be-

gitu dapat memberi dampak multiplier effect.

“Jangan hanya berharap pada APBD, tapi juga berusaha untuk bisa dapat APBN. Agar BCC ini dapat terus berkembang,” ungkap Politisi Partai Nasdem itu.

Kadisdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono menanggapi permintaan tersebut. Diakuinya, branding BCC saat ini belum setingkat nasional. Sehingga BCC belum banyak dikenal masyarakat luar.

Karenanya pihaknya berencana untuk menggandeng Diskominfo Bontang agar dapat membranding BCC hingga level nasional bahkan internasional. Perlu juga untuk mempromosikan BCC di media-media skala nasional dan internasional. “Semoga ke depan kami dapat terus meningkatkan BCC,” imbuhnya singkat. (al/adv)



YUSVA ALAM

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam (tengah) saat memimpin raker terkait BCC 2023.

Legislatif Sebut Ada Potensi Pariwisata Digabung Kebudayaan

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mempertanyakan kepada Pemkot Bontang, mengapa tidak menjadikan pariwisata sebagai dinas tersendiri. Karena menurutnya, apabila pemkot ingin fokus meningkatkan pariwisata, maka harus ada dinas sendiri yang mengurus masalah tersebut.

Hal itu diungkapkan Nursalam usai Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Diungkapkannya, dirinya dulu pernah mendengar bahwa pemkot akan menjadikan pariwisata prioritas sendiri. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum juga terwujud. Karenanya ia menyayangkan kondisi tersebut.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN), bahwa ada potensi pemkot untuk bisa menggabungkan pariwisata dengan kebudayaan, agar menjadi dinas tersendiri menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), bahkan bisa ditambah Ekonomi Kreatif yang masih sehubungan.

“Padahal LAN sudah menawarkan ke Bontang. Saya tidak tahu apakah

wali kota mau atau tidak dengan tawaran itu, tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi,” bebarnya.

Dijelaskannya, seandainya pemkot punya dinas sendiri untuk pariwisata dan kebudayaan, maka anggaran dan penyelenggaraan Bontang City Carnival (BCC) tidak perlu lagi di bawah Disdikbud. Disdikbud bisa fokus mengurus pendidikan saja.

“Kenapa saat ini penyelenggaraan BCC ada di Disdikbud, karena hanya di Disdikbud yang ada bidang kebudayaan. Di Dispopar yang membidangi pariwisata pun secara UU tidak bisa,” pungkasnya. (al/adv)



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM



SYAKURAH/RADARBONTANG

Ekspose hasil IKM DPMPPTSP semester I tahun 2023.

Ekspose Hasil IKM, DPMPPTSP Mendapat Nilai Baik

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Bontang melaksanakan ekspose hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I, Senin (23/20/23).

Adapun latar belakang IKM yakni mengukur pelayanan publik melalui penilaian masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan disetiap bagian penyelenggara.

"Triwulan I ini dinilai dari bulan Januari hingga Juni tahun 2023," kata Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

DPMPPTSP bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesetaraan Gender

dan Perlindungan Anak (P2KG-PA), LP2M Universitas Mulawarman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Perizinan digital DPMPPTSP tercatat sebanyak 467 layanan, melalui OSS-RBA 369 layanan, sehingga total pengguna layanan berjumlah 836 selama triwulan I.

Berdasarkan hasil survei menurut profil responden berumur 19 sampai 44 tahun ada sebanyak 177 (66,79%), usia 45-59 tahun sebanyak 81 (30,57%), dan usia lebih dari 60 sebanyak 7 (2,64%).

Selain itu, jenjang pendidikan mulai tidak sekolah hingga strata 2 ke atas, jenis pelayanan serta unsur pelayanan juga menjadi pertimbangan

dalam penilaian tersebut. Sehingga setelah dilakukan konversi nilai, DPMPPTSP mendapatkan total nilai sebesar 87.50 yang termasuk dalam kategori B atau Baik.

P2KG-PA juga memberikan rekomendasi untuk jangka pendek hingga jangka panjang, seperti mengidentifikasi masalah utama, feedback pelanggan, perencanaan strategis dan masih banyak lagi.

"Sistem OSS RBA sangat memengaruhi penilaian IKM ini karena sistem bisa saja mengalami eror, tapi kami tentu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," jelasnya. (adv)

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



DPRD PROVINSI KALTIM



Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang

Studi Kelayakan Fly Over MT Haryono - Teuku Umar Dianggarkan Tahun 2024

SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran untuk membangun flyover atau jalan layang yang menghubungkan Jalan MT Haryono dan Jalan Teuku Umar Samarinda telah diakomodir di APBD 2024.

Termasuk juga usulan anggaran untuk feasibility study (studi kelayakan) juga akan dilaksanakan pada tahun depan. "Sudah ada penganggaran untuk studi kelayakan dan itu memang belum termasuk anggaran pembangunan fisiknya," jelas Politisi PDI Perjuangan ini, Senin (23/10/2023).

Ia menerangkan bahwa studi kelayakan, dilaksanakan terlebih dahulu untuk menimbang dampak dari rencana pembangunan sebuah proyek. Bila studi kelayakan tersebut telah ada, barulah proses penganggaran pekerjaan fisik fly over tersebut dilakukan.

"Kalau tahapan studi kelayakan dan DED sudah ada, baru dilakukan penganggaran untuk pembangunan fisiknya," terangnya.

Pembangunan fly over MT Haryono - Teuku Umar sendiri mengemuka pada tahun 2023 ini. Diproyeksikan pembangunan jembatan layang ini untuk mencegah kecelakaan yang

acap kali terjadi di jalan tersebut.

Selain itu, jembatan layang ini juga dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi diperempatan tersebut khususnya di jam-jam tertentu yang padat kendaraan.

"Ini untuk memecah kepadatan lalu lintas, khususnya di simpang empat Jalan Teuku Umar dan Jalan MT Haryono yang juga menghubungkan pengendara ke Jalan M Said dan Jalan Tengkawang," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Masyarakat Diimbau Jangan Mudah Tergiur Pinjol dan Investasi Bodong

SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mengimbau masyarakat Kaltim tidak tergiur dengan pinjaman online (pinjol) dan investasi yang bodong yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, dewasa ini dengan sistem online sangat mudah untuk melakukan pinjaman atau investasi. Namun kerap kali masyarakat tidak melakukan hitung-hitungan dari segi pendapatan sehingga menjadi korban dan terlilit utang.

Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran yang memberikan kemudahan dan kecepatan pencairan dalam pinjaman. "Jangan tergiur dengan kemudahan dan kecepatan pencairan dana pinjol, karena bisa jadi kebiasaan buruk. Kita juga harus memperhatikan berapa pendapatan," tegasnya kepada media ini.

"Salah satu indikator investasi bodong yaitu modal kecil, tapi hasilnya besar dan waktunya singkat," sambungnya.

Sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan menurut Politisi Golkar ini. Ia pun mengaku, bahwa DPRD Kaltim terus melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum.

"Kami juga berkoordinasi dengan OJK daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pinjol dan investasi bodong. Kami harap masyarakat tidak mudah teripu dan melaporkan jika ada yang mencurigakan," bebarnya. (Eky/adv/DPDRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono

Jelang Pesta Demokrasi, Marthinus Minta Masyarakat Saring Berita Hoaks

SAMARINDA - Tinggal hitungan bulan lagi, perhelatan Pemilu 2024 akan berlangsung. Pemberitaan dari media konvensional, dan media sosial terus menghujani masyarakat.

Mengingat hal ini, Anggota DPRD Kaltim Marthinus mengimbau masyarakat menyaring informasi dan memilih sumber berita yang valid dan terpercaya. Agar, masyarakat dapat terhindar dari berita atau informasi hoaks.

"Momentum tahun politik, informasi hoaks itu pasti akan bermunculan, masyarakat harus cerdas dengan hal semacam itu," ucapnya, Senin (23/10/2023).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, berita hoaks dapat memicu masyarakat untuk terpecah belah. Sehingga kondusivitas sebelum dan

setelah Pemilu 2024 dapat terganggu. "Hoaks ini mampu menciptakan perpecahan sesama kelompok atau golongan lainnya," tegasnya.

Untuk itu edukasi kepada masyarakat, ujar Legislator Dapil Kubar-Mahulu ini, harus terus digalakan ditengah masyarakat. Selain itu lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan filterisasi berita dan informasi diminta lebih sigap melakukan antisipasi penyebaran hoaks.

"Kita harus cerdas dalam mendalami informasi yang didengar, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain," pungkasnya. (Eky/Adv/DPDRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim Marthinus

Jadi Pintu Gerbang Kaltim, Sapto Dorong Peningkatan Layanan Bandara Sepinggang



Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono

SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, mendorong peningkatan layanan di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan ditingkatkan. Hal ini harus dilakukan di mana kehadiran Ibu Kota Negara (IKN), sarana dan prasarana transportasi harus menjadi perhatian.

Menurutnya, sebagai bandara yang dengan klasifikasinya internasional, Bandara Sepinggang harus terus mengalami pengembangan. Apalagi, bandara yang terletak di Balikpapan itu merupakan salah satu pintu masuk Kaltim, dan menjadi penghubung ke Nusantara.

"Bandara itu adalah pintu masuk Kaltim. Artinya dengan adanya IKN, meski ada bandara VIP khusus, namun penumpang domestik tetap di Sepinggang," jelas Sapto kepada awak media.

Politisi Golkar ini menerangkan, dengan kehadiran IKN di Bumi Etam, mobilisasi masyarakat dari dan menuju Kaltim terus meningkat. Sarana dan prasarana transportasi udara di Kaltim harus terus ditingkatkan oleh pihak terkait khususnya pengelola bandara.

"Artinya bandara harus jadi yang terbaik, bagaimana mau masuk ke IKN kalau bandara kita tidak diolah dengan yang terbaik. Sangat bagus pastinya," tutupnya. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



Kode Promo
BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang



Kegiatan penerimaan praktek profesi ners, saat pengisian materi di Ruang Aula Nusa Indah, RSUD Taman Husada Bontang.

RSUD Taman Husada Gelar Orientasi Penerimaan Mahasiswa Profesi Ners

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang menggelar kegiatan sosialisasi dan orientasi Penerimaan Mahasiswa Praktek Profesi Ners pada Senin (23/10/2023). Acara yang dilaksanakan di Ruang Aula Nusa Indah, Lantai 5 ini diikuti oleh 11 orang mahasiswa, 8 dari RSUD dan 4 dari luar.

Bambang Sri Mulyono, selaku Koordinator Penunjang Keperawatan RSUD Bontang mengatakan adanya kegiatan penerimaan mahasiswa profesi ini sebagian merupakan proses sosialisasi atau proses orientasi bagi para mahasiswa yang ingin berpraktek sebagai perawat.

"Ini sebagai salah satu proses sosialisasi atau bisa disebut dengan masa orientasi bagi para mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung selama seharian full, dan beberapa muatan seperti pasien safety, kemudian sasaran keselamatan pasien, orientasi profil RS atau sebagainya," jelasnya.

Kegiatan praktek mahasiswa perawat ini dibuka untuk umum. Dika-

takan, kegiatan ini sudah terlaksana bertahun-tahun. Di mana, RSUD Bontang sebagai tempat praktek mahasiswa.

"Ini kegiatan sudah berjalan cukup lama, bukan pertama kalinya di Bontang. Untuk hari ini, ada sekitar 11 orang yang mengikuti. Sebenarnya banyak yang mengikuti, ratusan, bahkan ribuan. Hanya saja tidak terekspos," paparnya.

Dalam hal itu Bambang menambahkan, berharap tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di RS. Istilahnya, dengan untuk mengawal mutu RS, maka pihak RS juga tidak dirugikan dengan adanya kegiatan praktek, begitu pun sebaliknya. Saling kerja sama satu sama lain.

Adapun institusi penyelenggara pendidikan prifesi ners bukan hanya bekerjasama dengan RSUD Taman Husada Bontang saja. Tetapi, juga dengan beberapa RSUD yang ada di Bontang. Bahkan, menyebar di seluruh kabupaten dan sampai ke wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) tepatnya di Malinau dan Tana Ti-

dung.

Kiki Hardiansyah Safitri, selaku IT-KES (Institusi Tenaga Kesehatan) Wiyata Husada Samarinda menyatakan telah bekerja sama dengan beberapa RSUD yang ada, bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kita menggunakan RS menjadi tempat praktek profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di sini. Untuk profesi ners yang berkelanjutan dari sarjana keperawatan ini merupakan mahasiswa yang dulunya Diploma 3, naik menjadi profesi ners", bebarnya.

Perkuliahan ini berlangsung efektif selama 36 minggu. Dan sudah menjadi target pemerintah, dengan seminggu waktu perkuliahan berlangsung selama 45 jam. Kiki berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat mempunyai sebuah kemandirian di dalam profesinya. (adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

dr Siti Chodijah, dokter penanggung jawab klinik IPWL RSUD Taman Husada Bontang.

Rehab Pasien Pecandu Narkotika, RSUD Bontang Miliki Klinik IPWL

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki klinik Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pasien rehabilitasi pecandu narkotika dengan tingkat ringan, sedang dan berat.

Dokter penanggung jawab klinik IPWL, dr Siti Chodijah menjelaskan klinik IPWL RSUD Bontang hadir untuk memberikan bantuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI seperti RSUD Bontang.

Dr Siti Chodijah mengatakan IPWL RSUD diperuntukkan bagi masyarakat atau keluarga yang ingin merehabilitasi anggota keluarga yang telah mengalami kecanduan narkotika.

"Ada dua di Kota Bontang, salah satunya RSUD Bontang. Untuk rehabilitasinya terbuka untuk umum.

Siapa saja bisa bagi anggota keluarga yang merasa memiliki kerabat yang kecanduan narkoba," kata dr Siti Chodijah kepada Mediakaltim.com.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pasien terlebih dahulu akan dilakukan asesmen apakah memiliki tingkat kecanduan ringan, sedang maupun berat.

"Akan kita asesmen ketergantungannya. Sejauh mana dia (pasien) memiliki ketergantungan yakni ringan, sedang hingga berat. Kalau ringan dan sedang bisa kami rehab. Kalau berat akan kami rujuk ke BNNK Bontang atau ke tempat rehabilitasi tanah merah. Itu semua dimulai dari skrining kesehatan," lanjutnya.

Selain melakukan rehabilitasi pecandu narkoba dengan asesmen, klinik IPWL RSUD Taman Husada Kota Bontang juga melakukan konsultasi kesehatan terkait pecandu narkoba dengan dilakukan oleh dokter psikiater.

"Kita di sini ada dokter psikiatri. Ka-

lau memang nanti diperlukan terapi obat-obatan atau hanya wawancara motivasi, semua kita lakukan di sini," katanya.

Chodijah menyebutkan IPWL RSUD sendiri telah beroperasi sejak tahun 2018. Namun baru aktif kembali pada 2022 semenjak pandemi Covid-19 terjadi. Untuk penanganan kasus sepanjang pada tahun 2022, ada sebanyak 5 pasien yang ditangani. Sedangkan untuk tahun 2023 berjalan ini ada 2 pasien yang ditangani.

"Pasiennya sih tidak mengantre dengan kategori ringan dan sedang pasien. Untuk rehabnya dilakukan rawat jalan dengan memberikan kartu rawat jalan yang akan terus dievaluasi. Rehabnya bisa dilakukan sampai 2 hingga 3 bulan dengan 8 kali pertemuan," jelasnya.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Peringati Hari Santri Nasional, Santri Ganjar Senam Bersama Warga Kukar

KUTAI KARTANEGARA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan kegiatan senam bersama di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim pada Minggu (22/10). Koordinator Wilayah SDG Kaltim, Abdul Rahim mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk memperingati peringatan Hari Santri Nasional.

"Bertepatan di Hari Santri Nasional, kami melaksanakan kegiatan senam sehat bersama Yayasan Jantung Sehat Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Rahim.

Menurutnya, kegiatan juga ini menjadi ajang silaturahmi bagi ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah di Kutai Kartanegara. "Tentu kegiatan ini kita mendapat kesehatan, membangun relasi, menyatukan silaturahmi. Bahwa kunci dari sebuah kemenangan adalah solid," katanya.

Lebih lanjut, Rahim mengatakan bahwa senam ini bertujuan menjaga kebugaran para peserta, sekaligus mensosialisasikan gaya hidup sehat, khususnya kesehatan jantung.

Berkolaborasi dengan Yayasan Jantung Indonesia, membuat relawan menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Terlebih kasus penyakit jantung disebut Rahim, terus mengalami peningkatan.

"Kami bertujuan agar masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara itu menjaga kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Karena kita lihat tingkat penyakit jantung setiap tahunnya terus meningkat," jelasnya.

Pelaksanaan senam ini, disebut Rahim menjadi perwujudan komitmen relawan SDG Kaltim yang bukan sekadar mengkonsolidasikan dukungan terhadap Ganjar, namun juga bisa memberikan manfaat nyata

pada masyarakat.

Sosok Ganjar yang gemar berolahraga dan menjaga kebugarannya pun dikatakan Rahim menjadi inspirasi bagi SDG menggelar senam bersama itu.

Relawan ini pun berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan bermanfaat lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia menyebut, kegiatan di daerah Kutai Kartanegara selalu mendapat antusiasme tinggi, karena mayoritas warga di sana adalah pendukung Ganjar.

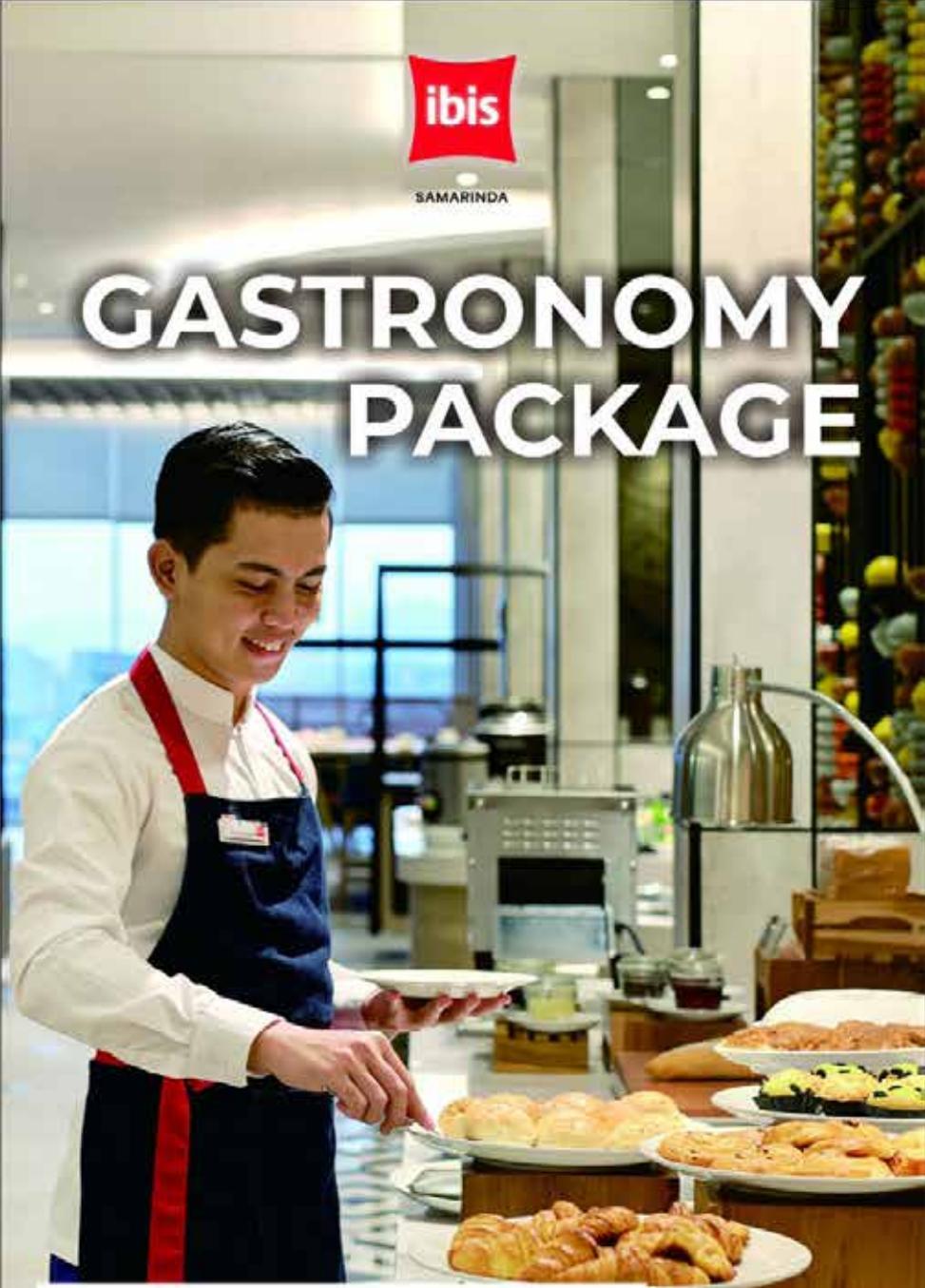
"Kegiatan berikutnya yang bersifat sosial masih banyak. Kita di Kaltim akan melakukan kegiatan yang insyaallah bisa memecahkan rekor, karena melihat di Kaltim khususnya di Kukar itu mayoritas pendukung Pak Ganjar," pungkasnya. (Adv)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Kalimantan Timur (Kaltim) senam bersama di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim pada Minggu (22/10).



ibis
SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:
@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Korlap IB, Ruslan menerima radio HT dari pembina Info Bencana Balikpapan H. Bisri Mustofa, Senin (23/10).

Pembina IB Balikpapan Serahkan Radio HT untuk Permudah Komunikasi

BALIKPAPAN - Info Bencana (IB) Kota Balikpapan kembali mendapatkan dukungan bantuan kelengkapan alat komunikasi berupa radio handy talkie (HT) pada Senin (23/10/2023). Kali ini bantuan radio HT diberikan langsung oleh pembina Info Bencana Balikpapan, H Bisri Mustofa kepada Ruslan selaku Korlap Info Bencana Balikpapan,

H Bisri Mustofa mengatakan, alat komunikasi berupa radio HT ini sangat penting dan dibutuhkan di lapangan dalam penanganan kebencanaan di kota Balikpapan.

"HT ini bagian dari getaran hati untuk Info Bencana, biar selalu terdepan dalam penanganan bencana. HT ini alat komunikasi yang memudahkan antar anggota," ujarnya.

Lebih lanjut H Bisri Mustofa menjelaskan, dengan komunikasi yang

cepat, yakni melalui radio HT ini maka jika terdapat informasi di lapangan terkait kebencanaan bisa segera di validkan alias A1 kan.

Sementara itu, Ruslan mengaku sangat berterima kasih atas bantuan berupa 2 unit radio HT yang diberikan langsung oleh seorang dewan pembina Info Bencana Balikpapan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, yang selama ini meneliti grup Info Bencana. Meskipun jarang komen, tapi beliau memperhatikan grup Info Bencana. Inilah salah satu kesan luar biasa dan berkah," ujarnya.

Ruslan menambahkan, H Bisri Mustofa juga merupakan pembina yang mana pada 5 tahun lalu juga memberikan bantuan berupa sepeda motor trail yang di gunakan oleh relawan kebencanaan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

Nantinya 2 unit radio HT yang diterimanya ini akan diserahkan kembali kepada anggota Info Kebencanaan yang aktif dilapangan agar memudahkan dalam berkomunikasi.

"Kita berikan radio ini kepada anggota dilapangan. Kita semua di grup ini transparan, biar semua anggota mendapatkan tapi tunggu gilirannya," jelasnya.

Ruslan berharap di musim kemarau ini bencana tidak terjadi di Kota Balikpapan. Namun demikian, jika ujian dan cobaan tersebut terjadi di Kota Balikpapan, ia siap melaporkan kejadian tersebut kapan pun dan di manapun.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Masih di Bawah 50 Persen, Pemkab Kubar Minta Maksimalkan Serapan Anggaran FCPF

KUTAI BARAT - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengelola Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Kutai Barat. Bertempat di Ruang Diklat lantai 2 Pemkab Kubar, Jumat (20/10/2023).

Dalam rapat tersebut, Asisten II Setdakab Kutai Barat, Rakhmat dalam arahannya meminta agar semua pemangku anggaran FCPF untuk segera merealisasikan fisik keuangan terutama yang realisasinya di bawah 50 persen.

"Harap dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dan

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Rakhmat.

Terpisah, Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Rita Nursandi menjelaskan, melalui pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah bertukar masukan, dan saran terkait pelaksanaan maupun pelaporan keuangan. Dengan tujuan untuk memahami dan pelaksanaan FCPF-CF berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun kegiatan penurunan emisi karbon merupakan anggaran substitusi pertukaran yang artinya Indonesia menjaga hutannya untuk penurunan emisi karbon dunia. Maka dari apa yang Indonesia lakukan diberikan-

lah anggaran semacam pertukaran manfaat.

Dana kompensasi akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penurunan emisi dan perubahan iklim.

"Program-program yang akan dan sudah dilaksanakan mencakup inisiatif peningkatan pengelolaan hutan, pengembangan energi terbarukan, pengurangan limbah, serta pemulihan Ekosistem yang terdampak," pungkas Rita.

Penulis : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari





Mediasi di DPRD Kabupaten Paser.

Mediasi Tuntutan Karyawan PT SUK Belum Ada Titik Terang

PASER - Karyawan PT Samindo Utama Kaltim (SUK) asal Kecamatan Tanah Grogot mengeluhkan atas kebijakan perusahaan yang berencana merelokasi karyawan untuk tinggal di Kecamatan Batu Sopang.

Dampaknya, karyawan yang terlanjur tinggal di Kecamatan Tanah Grogot tak lagi disediakan fasilitas bus penjemputan seperti biasanya dari KM 10, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot.

Persoalan itu hingga sampai saat ini belum ada penyelesaian, dengan demikian sampai kepada mediasi yang dilakukan oleh DPRD Paser, setelah menerima surat dari Serikat Pekerja Sejahtera Paser (SPSP) pada Jum'at 20 Oktober 2023 lalu.

Wakil Ketua I DPRD Paser, Abdullah, mengatakan, persoalan itu sudah diketahui pada minggu lalu,

upaya lebih dahulu dilakukan dengan menghubungi direktur perusahaan PT SUK, namun persoalan belum ada penyelesaian.

PT SUK dinilai terlalu saklek untuk bisa mengakomodir keinginan karyawan. Padahal, perusahaan lain tidak pernah ada masalah dalam urusan penjemputan karyawan.

"Mereka beralasan bahwa itu sudah keputusan perusahaan, jadi nanti kami bakal mengundang PT Kideco (induk perusahaan)," kata Abdullah, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SPSP bersama sejumlah karyawan PT SUK. Senin (23/10/2023).

Salah seorang karyawan PT SUK, Sir Jhon, mengatakan, bahwa sebelumnya sudah disepakati untuk lokasi penjemputan dari Kecamatan Tanah Grogot. Namun, pihak perusahaan

tiba-tiba menerbitkan surat soal penjemputan langsung dari Kecamatan Batu Kajang.

"Penjemputan itu tidak disepakati, hanya dilakukan secara sepihak," katanya.

Direktur PT SUK, Siswanto, mengatakan, kebijakan itu dilakukan dengan maksud keamanan dan keselamatan kerja. Karyawan yang tinggal di Kecamatan Tanah Grogot direncanakan untuk direlokasi ke Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang dengan mes yang disediakan.

"Saat ini kami berharap agar karyawan bisa dipindahkan ke Batu Kajang, karena induk perusahaan PT Kideco konsen akan keamanan dan keselamatan pekerja," kata Siswanto.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



Kegiatan Bateeq Noesantara di Hotel Aston Samarinda

Kalland Project Gelar Bateeq Noesantara, Ada Talkshow hingga Fashion Show

SAMARINDA - Kalland Project, sebuah Komunitas Faskriya (Fashion & Kriya) asal Samarinda, bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Samarinda, serta Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda menggelar event Bateeq Noesantara. Event ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20-22 Oktober 2023 di Hotel Aston Samarinda.

Tujuan pelaksanaan event ini yaitu, melestarikan batik dan mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia', menciptakan ekosistem dan embrio baru industri fashion, serta membuka peluang pasar bagi para desainer lokal Samarinda untuk menembus industri nasional.

Adapun rangkaian acara Bateeq Nusantara yaitu, Fashion Workshop, Beauty Class, Fashion Craft & Culinary Expo, Talkshow, hingga Fashion Show.

Dalam sesi Talkshow dengan tajuk Sustainable Fashion, menghadirkan fashion designer sebagai narasumber, yaitu Meinnisa Wiyandari dan Emelda Andayani.

Meinnisa Wiyandari yang akrab disapa Mei, menuturkan bahwa in-

dustri fast fashion menimbulkan permasalahan di hilirnya, yaitu limbah dan sampah pakaian yang sudah tidak terpakai.

Sehingga, menurut Mei untuk mengantisipasi penambahan sampah akibat fast fashion, yaitu menjadi konsumen yang bijak, mulai dari memilih pakaian yang timeless, kreatif dalam memadupadankan item pakaian, serta berhati-hati dalam memilih bahan pakaian.

Berdasarkan data, terdapat 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Sedangkan untuk pakaian berbahan polyester membutuhkan waktu 10-40 tahun untuk mengurai.

"Masalah zaman sekarang yaitu membeli baju karena dirasa lucu. Ini berkontribusi terhadap penambahan sampah fast fashion. Selain itu terjadi eksploitasi tenaga kerja akibat industri fast fashion ini. Maka, jadilah konsumen yang bijak dalam memilih produk yang akan digunakan," ujar Mei

Selain itu, Emelda Andayani menambahkan bahwa konsumen dapat menggunakan konsep 'reuse' dan berkreasi dengan item fashion agar menjadi berbagai macam 'look',

dan untuk produsen diharapkan agar menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

"Sebagai pegiat fashion, kita harus peduli dengan lingkungan. Salah satunya memilih bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan konsep reuse, tidak harus pakaian baru untuk tampil menarik," ujar Emelda

Sementara itu, Founder Kalland Project, Anas Maghfur, mengungkapkan bahwa anggota dari Kalland Project mencapai 80 orang, yang terdiri dari desainer, pelaku industri kriya, dan fashion enthusiast.

Anas berharap agar ke depannya seluruh pihak terkait untuk mendukung ekosistem fashion di Samarinda untuk dapat berkembang.

"Saya berharap industri fashion di Kalimantan Timur dapat berkembang. Tetapi ini butuh kerjasama semua pihak. Sehingga di Kalland Project memberikan wadah bagi mereka yang peduli dengan pengembangan industri fashion," tutupnya.

Pewarta : Desy Alvionita

Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



BELAJAR DARI BPBD DIY,
PESERTA PELATIHAN TINGKATKAN
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KALTIM



WORKSHOP CORPU,
UPAYA MENINGKATKAN
KOMPETENSI ASN DI KALTIM



WORKSHOP CORPU, UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN DI KALTIM

JAKARTA - Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Gubernur Kaltim terkait Pengelolaan CORPU (Corporate University) dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim telah melangkah lebih jauh dengan mengirim Pejabat Struktural dan Widyaiswara untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai strategi pemasaran CORPU di lingkungan Pemprov Kaltim.

Kegiatan berlangsung selama 2 hari efektif dan mengambil tempat di PPM Manajemen, Jakarta, pada 13 dan 14 Oktober 2023.

Workshop tersebut memiliki dua agenda utama, yakni membahas tentang Desain Pengembangan Garis Besar Isi Modul (GBIM) dan Strategi Pengembangan CORPU.

Workshop dipandu dua narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Robinson Simangunsong, M.Pd., Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Zusty Dewayani, Direktur Jasa Pengembangan Eksekutif, PPM Manajemen.

Nina Dewi, Kepala BPSDM Kaltim, dalam

sambutannya, menekankan pentingnya tugas BPSDM Kaltim dalam mengembangkan kompetensi ribuan ASN di Kaltim, termasuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengajak seluruh jajaran BPSDM untuk memahami betapa pentingnya peran mereka sebagai teladan bagi ASN lainnya.

Prof. Dr. Robinson Simangunsong, sebagai narasumber utama, mengingatkan akan potensi ketidaksinkronan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan CORPU. Oleh karena itu, ia mendorong pentingnya melakukan harmonisasi, dengan mengacu pada prinsip otonomi daerah.

Salah satu peserta workshop, Jauhar Efendi, melaporkan bahwa seluruh peserta, sebanyak 16 orang, aktif terlibat dalam diskusi yang berfokus pada berbagai aspek strategi pengembangan CORPU. Hal ini diharapkan akan menghasilkan program-program yang spesifik dan menjadi unggulan bagi BPSDM Kaltim dalam upaya pengembangan ASN. **(MJE/ADV)**



Rangkaian Kegiatan Benchmarking di Yogyakarta

BELAJAR DARI BPBD DIY, PESERTA PELATIHAN TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KALTIM

YOGYAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim menyelenggarakan kegiatan Benchmarking ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bagi Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana tahun 2023 Provinsi Kaltim. Kegiatan ini berlangsung, Selasa (17/10/2023) di Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan Benchmarking tersebut Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si, Sekretaris BPBD Provinsi DIY, Marlina Handayani, S.Pd, MM, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi DIY, Lilik Andi Ariyanto, S.IP, MM, serta jajaran BPBD Provinsi DIY, pejabat administrator, widyaiswara BPSDM Kaltim, dan analis Bangkom BPSDM Provinsi Kaltim, panitia penyelenggara dari Bidang PKT BPSDM Kaltim, serta peserta.

"Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Benchmarking Peserta Pelatihan Dasar Manajemen

Bencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2023," ujar Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, MAP saat memberikan sambutan pembukaan Benchmarking.

Nina Dewi menjelaskan bahwa kegiatan benchmarking ini merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 09 sampai dengan 12 Oktober 2023 lalu.

"Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk belajar dari pengalaman BPBD Provinsi DIY mengenai proses dan sistem manajemen operasional pada penanggulangan bencana," katanya.

Dalam kegiatan benchmarking ini, peserta akan melihat praktik terbaik yang telah diterapkan BPBD DIY. Peserta akan mendiskusikan strategi penanggulangan bencana yang telah teruji, teknologi yang digunakan dalam pemantauan dan peringatan dini, serta cara terbaik untuk melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

"Saya yakin, hasil dari kegiatan benchmarking ini akan menjadi lan-

dasan yang kuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat kita dalam menghadapi bencana di masa depan," pungkasnya.

Nina Dewi berharap semua peserta yang telah hadir dan berkontribusi dalam acara ini dapat mengikuti sesi benchmarking ini dengan semangat dan keterbukaan untuk belajar satu sama lain.

"Selamat mengikuti acara ini, dan mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana karena Bencana adalah Urusan Kita Bersama," tutupnya.

Diketahui, Benchmarking adalah praktik membandingkan ukuran kinerja utama, tren, dan proses manajemen dengan organisasi sejenis. Ini adalah alat yang sangat berharga untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Organisasi dan area potensial untuk perbaikan.

Kegiatan dalam Benchmarking adalah membandingkan suatu kegiatan antar organisasi yang telah dicapai untuk meraih formula yang baru dan pas bagi peserta Benchmarking untuk dipraktikkan di daerahnya. **(Han/ADV/BPSDM)**

Pewarta: Hanaf

Editor: Agus Susanto



Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Dra Nina Dewi M AP saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara

BPSDM Kaltim Gelar Evaluasi Pasca Latsar CPNS di Paser

PASER - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) menggelar Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kyriad Hotel Sadurangas, Paser, Kamis (19/10/23)

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BPSDM Provinsi Kaltim dengan Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser. Dalam acara ini juga turut menghadirkan 3 Pemateri yaitu Analis Pengembangan kompetensi Ahli Muda, Dimas Radhitya Anggara, Widyaiswara Ahli Madya, M. Denny Syahroni dan Widyaiswara Ahli Muda, Yoyok Setyo Langgeng.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan kegiatan ini guna mengetahui perkembangan alum-

ni pelatihan pasca mengikuti pelatihan dan sebagai pemenuhan data dan Informasi tentang implementasi atau penerapan pelatihan yang telah dilaksanakan.

"Evaluasi pasca diklat adalah salah satu fungsi dalam tahapan kontrol dalam suatu proses manajemen penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca pelatihan. Ini suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pelaksanaan secara obyektif, reliabel dan sah atau valid yang dilakukan setelah selesai proses pelatihan," ungkapnya.

Nina Dewi berharap melalui kegiatan ini para peserta tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat.

"Untuk para peserta diharapkan belajar dengan sebaik-baiknya dalam pelatihan ini. Semoga dari pelatihan ini para peserta tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari



Acara dibuka Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Suhajar Diantoro, pada Senin (17/10).

BPSDM KALTIM SIAPKAN FASILITATOR ORIENTASI DPRD

JAKARTA - Untuk mengantisipasi terpilihnya anggota DPRD periode 2024-2029, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengukuhkan tujuh Widyaiswara untuk mengikuti Pelatihan Training of Trainers (Pelatihan untuk Pelatih) Orientasi DPRD.

Pelatihan diikuti empat orang Widyaiswara Ahli Utama, yakni Muchlis Syachrani, Bere Ali, Sugeng Chairuddin, dan tiga orang Widyaiswara Ahli Madya, yakni Zuhriah, Ery Arifullah, dan Hernawaty.

Pelatihan yang dilaksanakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri berlangsung di Hotel Golden Boutique, Jakarta, mulai 16 hingga 20 Oktober 2023.

Dari Kaltim, mereka bergabung dalam angkatan pertama bersama Provinsi Aceh, Jawa

Barat, Sulawesi Selatan, Kalbar, NTB, dan Provinsi Banten, serta perwakilan dari Universitas Gajayana, Malang.

Jauhar Efendi, salah satu peserta ToT Orientasi DPRD, saat dihubungi awak media, menjelaskan bahwa materi pelatihan cukup banyak, termasuk tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, Penguatan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Materi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkas Jauhar. **(MJE/ADV)**



Gedung tiga tingkat yang diperuntukan untuk ruang kelas pelatihan milik BPSDM Kaltim yang dipisahkan oleh taman.

MENGINTIP FASILITAS PELATIHAN DI BPSDM KALTIM YANG DINILAI SANGAT MEMADAI

SAMARINDA - Guna memenuhi 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan ASN, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 24 JP, BPSDM Kaltim harus memiliki fasilitas yang memadai.

Salah satunya, untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya classical (tatap muka). Sehingga, mengharuskan para peserta menginap di Samarinda tempat pusat pelaksanaan pelatihan yang berada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPSDM Kaltim Samsul Qamar mengungkapkan, saat ini fasilitas yang dimiliki oleh BPSDM Kaltim dalam melaksanakan kegiatan pelatihan bisa dikatakan cukup memadai. Yakni, dengan jumlah fasilitas ruang belajar di 2 gedung terpisah dan ruang kelas berjumlah 9 ruangan kelas di masing-masing gedung. Kondisi ini dirasa masih cukup untuk melayani para peserta pelatihan

selama ini.

"Kita memiliki 2 gedung untuk pelatihan, 1 gedung itu 3 tingkat dan 1 tingkatnya ada 3 ruang kelas. Jadi kali 3 tingkat artinya dalam satu gedung itu ada 9 kelas kali 2 gedung artinya ada 18 ruang kelas dengan kapasitas satu ruangan itu 40 orang," papar Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPSDM Kaltim Samsul Qamar.

Sedangkan untuk asrama BPSDM Kaltim memiliki 4 gedung asrama. Setiap gedung ada 25 kamar dengan kapasitas tempat tidur berbeda pergedung. Gedung A dan B memiliki masing-masing 75 tempat tidur sedangkan gedung C dan D memiliki masing-masing 50 tempat tidur. Jadi secara keseluruhan fasilitas asrama memiliki 250 tempat tidur yang berada di 4 gedung asrama tersebut.

"Asrama kita ada 4 gedung, gedung A dan B satu kamar ada tiga tempat tidur, sedangkan untuk gedung C dan D satu kamarnya dua tempat tidur, dan setiap

gedung itu 25 kamar," jelasnya.

Oleh sebab itu untuk pemenuhan pelatihan untuk ASN se-Kaltim cukup bisa menampung asal terjadwal dengan baik. Pasalnya, setiap tahun ribuan ASN melaksanakan pelatihan di kompleks perkantoran BPSDM ini.

"Selama ini semua berjalan lancar, karena penjadwalan yang rapih. Pernah maksimal kita jalankan pelatihan itu empat kelas sekaligus, perkelas itu empat puluh orang, kita bisa melaksanakan kalau asramanya cukup," pungkasnya.

Diketahui, selain sarana pelatihan, di dalam kompleks perkantoran BPSDM ini, dinilai juga sangat lengkap. Ada kantin, ruang laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga seperti tempat fitnes, lapangan mini soccer, lapangan bola basket. Selain itu juga ada dua gedung aula untuk menyelenggarakan acara, gedung poliklinik dan masjid Tarbiyatul Muttaqin.

(ADV)

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari